

## BAB 4

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN DATA

#### 4.1. Gambaran Umum Penelitian

##### 4.1.1. Sejarah Konflik Semenanjung Korea

Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan terjadinya konflik dengan eskalasi yang tinggi. Ketegangan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi lebih dari 60 tahun menjadi penyebab utama ancaman bagi stabilitas keamanan baik di kawasan Asia Timur maupun global. Meskipun konflik saat ini tidak terjadi secara masif, tindakan provokasi dan juga perlombaan senjata antara kedua negara terjadi dengan skala dan intensitas yang cukup tinggi tetap menjadi ancaman. Peningkatan kekuatan persenjataan oleh Korea Utara dengan terus melakukan proliferasi Nuklir dan mengembangkan kemampuan rudal balistik menjadikan Korea Utara menjadi tantangan bagi keamanan.

Konflik di Semenanjung Korea dimulai sejak masa era kolonial Jepang dari tahun 1910 dan berakhir pada tahun 1945. Selama kurun waktu lebih 30 tahun, Jepang menguasai seluruh elemen kehidupan masyarakat Korea. Penggunaan bahasa lokal dan seluruh identitas asli bangsa Korea dilarang dan digantikan dengan identitas bahasa serta budaya bangsa Jepang. Kekerasan dan tekanan yang terus muncul pada akhirnya memunculkan pergerakan perlawanan atau *anti-imperialist movement* sebagian masyarakat di Korea yang terdiri dari kaum intelektual dan pelajar yang menginginkan kemerdekaan dari Jepang melalui cara-cara anti kekerasan dengan meminta dukungan progresif dari negara-negara barat salah satunya Amerika Serikat. Berbagai macam cara telah dilakukan namun tidak menghasilkan perubahan besar hingga sebagian dari mereka akhirnya memilih untuk menjadi militan dan melakukan perlawanan kepada Jepang dengan cara-cara yang radikal. Kelompok perlawanan Jepang di Korea pada waktu itu terbagi menjadi dua yakni kelompok berhaluan Komunis dan Nasionalis. Kedua kelompok

inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya partai Komunis dan Nasionalis di Korea di tahun 1925 (Worden, ed. 2008, 29:33)

Selama menjalankan aksinya, kelompok Komunis melakukan pergerakan dengan cara bergerilya dan bergabung bersama kelompok pergerakan Tiongkok dan tentara Uni Soviet untuk menyerang tentara Jepang di tahun 1931 (Worden, ed. 2008: 33). Mengingat pada waktu itu Jepang juga terlibat konflik dengan Uni Soviet, hal ini menjadi momentum bagi kelompok berhaluan Komunis untuk menggabungkan kekuatan guna bersama-sama menyerang Jepang. Salah satu pejuang gerilya partai Komunis Korea pada waktu itu ialah Kim Il Sung yang pada akhirnya menjadi pemimpin Korea Utara. Hal ini berbeda dengan kelompok Nasionalis yang bergerak dengan cara yang lebih diplomatis dengan melakukan negosiasi dan bekerja sama dengan Amerika Serikat guna mendapatkan dukungan untuk memerdekakan negaranya dari penjajahan Jepang. Aliansi yang dilakukan oleh dua kelompok pergerakan tersebut pada akhirnya menjadi cikal bakal konflik yang lebih besar di Semenanjung Korea (Worden, ed. 2008: 32-37).

Mobilisasi kekuatan yang dilakukan oleh Uni Soviet di Semenanjung Korea untuk bersama-sama melawan penjajahan Jepang semakin hari kian menguat. Hal ini dilihat sebagai sebuah kekhawatiran bagi Amerika Serikat jika Jepang telah meninggalkan Semenanjung Korea maka Uni Soviet yang akan berkuasa. Untuk itu agar tidak terjadi hal demikian, Amerika Serikat menginisiasi sebuah pertemuan pada bulan Maret di tahun 1943 di Inggris yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai pemisahan Semenanjung Korea menjadi dua zona wilayah yakni Utara untuk Uni Soviet dan Selatan untuk Amerika Serikat. Adapun pemisahan tersebut ditandai dengan sebuah garis pemisah yang disebut dengan titik 38<sup>0</sup> Paralel dan pada tahun 1945 setelah Jepang mengalami kekalahan pada perang dunia II, Amerika Serikat memutuskan untuk mengirimkan sekitar 25.000 tentara ke Semenanjung Korea zona Selatan untuk mengamankan wilayah ( Worden, ed, 2008: 37-38).

Langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan awal dari dimulainya Perang Dingin di Semenanjung Korea antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dimana Korea bagian Selatan di pengaruhi oleh kekuatan Amerika Serikat dan Korea bagian Utara dikendalikan oleh kekuatan Uni Soviet yang berlatar komunis. Intervensi oleh dua kekuatan besar tersebut menjadikan Semenanjung Korea sangat susah untuk disatukan kembali. Pada akhirnya, kedua Korea memutuskan untuk mendirikan dua negara yang berbeda yang mana Korea Selatan memproklamirkan diri sebagai negara pada 15 Agustus 1948 dengan dikepalai oleh Syngman Rhee dan sebulan setelahnya yakni 9 September 1948 Korea Utara juga memutuskan untuk membentuk negara tersendiri dengan Kim Il Sung sebagai pemimpinnya (Worden, ed, 2008: 42).

Setelah menjadi dua negara, ketegangan dan konflik antara Utara dan Selatan semakin meningkat. Hal ini tidak lain karena adanya ambisi dari Kim Il Sung untuk melakukan unifikasi dan mengkomunikasikan Korea bagian Selatan dengan dibantu oleh Uni Soviet dan Tiongkok pada waktu itu (Worden, Ed. 2008: 40-42). *Proxy war* yang dilakukan oleh kedua negara menjadikan intensitas ketegangan di Semenanjung Korea antara kelompok partai Komunis dan partai Nasionalis semakin meningkat dan puncaknya ialah terjadi Perang Korea pada 24 Juni 1950. Pada hari itu, Korea Utara melakukan penyerangan ke Korea Selatan hingga melintasi perbatasan dan berhasil menguasai hampir sebagian besar wilayah di Korea Selatan (Worden, ed. 2008: 43-45, Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 27-28).

Bersama dengan Amerika Serikat, Korea Selatan melakukan serangan balasan hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Korea Utara dan merebut kembali wilayah Korea Selatan yang sebelumnya sempat dikuasi pihak Utara (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 27). Setelah lebih dari dua tahun berperang, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1953 kedua pihak berkonflik memutuskan untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata dan mendirikan zona bebas militer di titik perbatasan 38° Paralel. Perjanjian tersebut secara resmi menghentikan

perang dan kekerasan di Semenanjung Korea antara kedua negara (Worden, ed. 2008: 63). Meskipun kekerasan dan perang telah terhenti, namun hubungan dan ketegangan kedua negara masih terus berlanjut hingga sampai saat ini. Konflik berkepanjangan tersebut terjadi dikarenakan ketidakmampuan kedua negara untuk mencapai perjanjian damai setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di tahun 1953. Selain itu, adanya sistem Internasional di Kawasan yang mempengaruhi yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet serta Tiongkok menjadikan konflik semakin kompleks dan sulit untuk diselesaikan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perang korea di tahun 1950 turut menjadi pendorong Korea Utara membangun kekuatan Nuklirnya. Intesitas ketegangan antara kedua negara semakin meningkat ketika Amerika Serikat menempatkan senjata nuklir di Korea Selatan pada tahun 1958, yakni lima tahun usai berlangsungnya perjanjian gencatan senjata. Hampir lebih dari beberapa dekade pasca penandatanganan gencatan senjata, pemerintah Pyongyang telah mengalami hubungan diplomatik yang buruk dengan pemerintah Seoul dan Washington. Puncaknya ialah pada akhir tahun 1960 terjadi perkelahian antara pihak militer Korea Utara dan Selatan di perbatasan DMZ (*De-Militarized Zone*) dan percobaan pembunuhan presiden Korea Selatan Park Chung-hee di tahun 1974 oleh agen Korea Utara serta penangkapan kapal perang Amerika Serikat oleh Korea Utara. Serangkain peristiwa tersebut semakin meningkatkan ketegangan hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat (Larner: 2010).

Selain itu, puncak ketegangan di Semenanjung Korea terjadi pada tahun 2000-an ketika presiden Amerika Serikat pada waktu itu George W.Bush menyandingkan Korea Utara bersama dengan Iran sebagai "*exist of evil*" (Beriker, Sandole, Bryne. 2009: 264). Hal ini turut pula meningkatkan ketegangan hubungan Korea Utara dengan Korea Selatan yang merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di Asia Timur. Tindakan provokasi dan uji coba baik rudal maupun nukir oleh Korea Utara semakin ditingkatkan. Hal ini sebagai bentuk *deterrence* terhadap ancaman dari

Amerika Serikat yang pada waktu itu tengah mengalami masalah keamanan akibat terjadinya peristiwa 9/11. Bagaimanapun juga, dapat dikatakan bahwa Konflik di Semenanjung Korea telah menjadi “*cycle of provocation*” antara Korea Utara dan Selatan serta Amerika Serikat (Kearney, 2017: 10). Provokasi dan konflik seperti ini tidak dapat dipungkiri akan tetap terus terjadi di Semenanjung Korea sebagai akibat dari belum adanya sebuah perjanjian damai yang mengikat kedua belah pihak untuk saling rekonsiliasi satu sama lainnya guna menjalin hubungan yang lebih baik dan harmonis. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan dinamika konflik antara Korea Selatan dan Utara dalam kurun waktu enam tahun terakhir:

**Tabel 4. 1** Dinamika Konflik Korea Selatan dan Korea Utara antara tahun 2010- 2016

Tahun	Korea Utara	Korea Selatan
2010	<p>a. Penembakan kapal perang <i>Cheonan</i> milik Korea Selatan oleh rudal Korea Utara</p> <p>b. Penembakan artileri ke pulau <i>Yeonpyeong</i> milik Korea Selatan oleh Korea Utara. Akibat insiden ini setidaknya dua tentara Korea Selatan tewas dan mencederai penduduk setempat serta merusak beberapa gedung dan bangunan.</p>	<p>a. Latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai respon atas provokasi Korea Utara di lokasi tepat dimana insiden <i>Cheonan</i> terjadi</p> <p>b. Korea Selatan membalas dengan menembakkan artileri ke Korea Utara dan menempatkan pasukan pasukan bersenjata serta jet tempur sebagai bentuk <i>defense</i> atas sikap Korea Utara</p>
2011	<p>a. Meluncurkan rudal jarak pendek/ SRBM (<i>Short Range Ballistic Missile</i>) pada bulan desember dan bertepatan dengan kematian Kim Il Sung</p>	<p>b. Korea Selatan melakukan latihan militer gabungan bersama dengan Amerika Serikat</p>
2012	<p>a. Serangan <i>cyber</i> oleh Korea Utara kepada</p>	<p>a. Penyeleggaran latihan militer gabungan dengan</p>

	<p>beberapa kantor berita Korea Selatan dan penyerangan sistem navigasi GPS yang mengganggu penerbangan, dan transportasi laut</p> <p>b. Dua kali meluncurkan LRBM (<i>Long Range Ballistic Missile</i>) <i>Taepodong/ Unha</i>. Peluncuran pertama dinyatakan gagal, namun uji coba kedua berhasil</p>	<p>Amerika Serikat dan mengecam tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara</p> <p>b. Mengajukan pemberian Sanksi kepada Korea Utara ke PBB</p>
2013	<p>a. Korea Utara tetap melakukan serangan <i>cyber</i> ke beberapa instansi pemerintahan dan kantor perbankan Korea Selatan</p> <p>b. Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawa tanah. Akibat dari uji coba tersebut, wilayah Korea Selatan dan Jepang merasakan gempa atau getaran ringan</p>	<p>a. Mengecam dengan keras atas tindakan serangan <i>cyber</i> yang dilakukan oleh Korea Utara</p> <p>b. Menyelenggarakan latihan militer gabungan bersama dengan Amerika Serikat</p>
2014	<p>a. Melakukan rencana reuni keluarga yang terpisah dengan Korea Selatan, meskipun hampir membatalkan karena Korea Selatan yang melakukan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat</p> <p>b. Korea Utara meluncurkan ICBM (<i>Intercontinental Ballistic Missile</i>)</p> <p>c. Uji Coba SLBM (<i>Submarine-launched Ballistic Missile</i>) –</p>	<p>a. Melakukan rencana pertemuan kembali keluarga yang terpisah dengan Korea Utara</p> <p>b. Menyelenggarakan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat dan mengecam dengan keras tindakan peluncuran misil dan rudal oleh Korea Utara.</p>

	<i>Pukkuksong-1</i> atau KN-11	
2015	a. Dua kali melakukan uji coba peluncuran SLBM ( <i>Submarine-launched Ballistic Missile</i> ). Dari uji coba tersebut, peluncuran pertama gagal dan peluncuran kedua berhasil	a. Korea Selatan dan Amerika Serikat melakukan latihan militer gabungan di Semenanjung Korea
2016	a. Januari 2016, Korea Utara berhasil melakukan uji coba senjata pemusnah masal “bom hidrogen”  b. Meluncurkan LRBM ( <i>Long Range Balistic Missile</i> ) ke orbit	a. Korea Selatan menembaki kapal nelayan dan patroli milik Korea Utara yang dianggap melewati garis batas utara Semenanjung Korea.  b. Korea Utara dan Amerika Serikat bekerjasama mengembangkan THAAD ( <i>Terminal High Altitude Area Defense</i> ) sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari ancaman rudal dan nuklir oleh Korea Utara

Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara merupakan sebuah bentuk respon atau *balance of power* dari kedua negara. Pola konflik dan ketegangan kedua negara tetap sama dari tahun ke tahun, dimana Korea Utara akan selalu melakukan pengembangan kekuatan persenjataan dan nuklir. Sedangkan disisi lain, Korea Selatan tetap melanjutkan latihan militer gabungan dengan Amerika Serikat yang merupakan agenda rutin kedua negara. Konflik tersebut berkembang dengan cukup fluktuatif dan bersifat *action and reaction*. Sehingga, sedikit apapun perubahan pola kebijakan baik oleh Korea Utara ataupun Korea Selatan dan Amerika Serikat, maka akan

turut mempengaruhi pola konflik kedua negara apakah tereskalasi atau terdeeskalasi.

#### **4.1.2. Upaya Resolusi Konflik di Semenanjung Korea melalui Track I**

Meskipun konflik dan provokasi terus berlangsung, upaya resolusi konflik bukannya tidak pernah dilakukan. Beberapa kali pemerintah Korea Selatan serta Amerika Serikat berupaya untuk melakukan proses perbaikan hubungan melalui upaya diplomatis baik itu sifatnya bilateral maupun multilateral. Salah satu upaya dialog yang dilakukan melalui Track I ialah satu tahun setelah proses gencatan senjata tahun 1953 yakni pada tahun 1954 petinggi militer dari KPA (*Korean People Army*), CPV (*Chinese People Volunteer*), dan pihak militer dari Amerika Serikat serta Korea Selatan bertemu di konferensi Geneva untuk membicarakan secara formal terkait kesepakatan damai, namun pertemuan tersebut justru banyak membahas mengenai masalah mekanisme pemilihan umum dan bagaimana upaya untuk memperbaiki hubungan antara Korea Utara dan Selatan pasca penandatanganan perjanjian gencatan senjata, alhasil pertemuan tersebut berakhir tanpa sebuah perjanjian damai (Kearney, 2017: 15-16).

Selain itu, selama tahun 1970 terjadi interaksi positif antara pemerintah Korea Selatan dan Utara. Selain itu, pada tahun 1971 hubungan diplomatik Korea Utara dan Selatan semakin baik ketika diadakan program reunifikasi keluarga yang terpisah akibat perang oleh Palang Merah Internasional. Kesempatan kedua negara memperbaiki hubungan juga terjadi selama administrasi presiden Roh Tae-woo tahun 1988 hingga 1992. Pada masa kepemimpinannya, presiden Roh mendeklarasikan perbaikan hubungan dengan Korea Selatan melalui politik, ekonomi, dan pertukaran budaya (ROK Ministry of Unification. White Paper on South –North Dialogue, pp. 461-465, 20 August 2001). Selain itu, presiden Roh juga mempromosikan perdagangan antar Korea dan berjanji untuk memberikan bantuan kepada Korea Utara guna memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat serta Jepang (Kearney,

2017: 16). Hasilnya di tahun yang sama, Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan memulai inisiatif untuk membangun hubungan diplomatik dengan Korea Utara (Woden, ed. 2008: 277).

Hal tersebut merupakan langkah awal dalam proses resolusi konflik antara pemerintah Korea Utara dan Selatan serta Amerika Serikat. Hubungan baik dan juga upaya-upaya resolusi konflik melalui track I terus dilakukan hingga pada tahun 1991, Korea Utara dan Selatan menandatangani sebuah perjanjian guna membangun rekonsiliasi dan tindakan non-agresi (UN Peacemaker, 13 Desember 1991. Kearney, 2017: 72). Dalam perjanjian tersebut ditetapkan empat komisi gabungan untuk bekerja merealisasikan prinsip-prinsip yang ada di dalam perjanjian tersebut, antara lain rekonsiliasi Utara dan Selatan, pertemuan militer Utara dan Selatan, kerjasama ekonomi Utara dan Selatan, serta pertukaran sosial dan budaya Utara dan Selatan. Empat item tersebut menjadi poin utama bagi terciptanya rekonsiliasi antara kedua negara untuk mengakhiri konflik yang terjadi (Kearney, 2017: 72).

Upaya resolusi konflik semakin menguat ketika tahun 1992, Korea Utara dan Korea Selatan menandatangani "*Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*" atau deklarasi anti pengembangan nuklir di Semenanjung Korea. Dalam deklarasi tersebut, dinyatakan larangan bagi kedua belah pihak baik Korea Utara maupun Selatan untuk menguji coba, memproduksi, menerima, memproses, atau menggunakan senjata nuklir serta secara sembunyi-sembunyi melakukan pengayaan uranium (Worden, ed. 2008: 261). Untuk melengkapi deklarasi tersebut, Korea Utara di tahun yang sama juga menandatangani perjanjian IAEA (*The International Atomic Energy Agency*). Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Korea Utara memberikan akses kepada IAEA untuk melakukan inspeksi ke fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara (Worden, ed. 2008: 261-262).

Selain itu, di tahun yang sama presiden Amerika Serikat George H.W. Bush dan presiden Roh Tae-woo sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara sepakat untuk meniadakan latihan militer

gabungan yang biasanya diselenggarakan secara rutin (Worden, ed, 2008: 278). Sebagai bentuk respon dari keinginan Korea Selatan dan Amerika untuk memperbaiki hubungan, pemimpin Korea Utara pada waktu itu Kim Il Sung menanggukhkan upacara acara anti Amerika yang biasanya diselenggarakan rutin tiap tahun dan perayaan kemenangan di Perang Korea. Kim Il Sung memberikan pernyataan bahwa *“If the united states takes the road to improve relations with us, we shall also do so without recalling the past”*. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kim Il Sung menerima baik upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan (Bok Lee, Patterson. 1998:127-128). Realisasinya ialah pada tahun 1992, diplomat Amerika Serikat dan Korea Utara bertemu beberapa kali di Beijing untuk membahas mengenai kemungkinan penyelesaian isu proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara (Kearney, 2017: 73).

Seluruh perjanjian dan upaya rekonsiliasi tersebut gagal ketika terjadi perubahan kepemimpinan di Korea Selatan dan Amerika Serikat. Bagi Korea Selatan, setelah masa kepemimpinan presiden Roh berakhir akan sulit untuk memulai kembali pendekatan kepada Korea Utara. Presiden Kim Young Sam memulai pendekatan dengan menginisiasi pertemuan dengan Kim Il Sung di tahun 1994, namun sebelum rencana tersebut dimulai pemimpin Korea Utara Kim Il Sung terlebih dahulu jatuh sakit dan akhirnya meninggal (Kearney, 2017: 74).

Seluruh upaya yang sebelumnya dilakukan mengalami kegagalan dan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong Il memberikan tantangan yang sangat besar bagi proses resolusi konflik di Semenanjung Korea pada waktu itu. Pada tahun 1994 misalnya, Korea Utara melarang IAEA melakukan inspeksi atas fasilitas nuklir di Korea Utara. Akibat larangan tersebut, Amerika Serikat menyiapkan sanksi ekonomi dan mengirimkan pasukan ke Korea Selatan sebagai bentuk antisipasi terjadinya perang dengan Korea Utara (Worden, ed. 2008: 261-262).

Sebagai langkah untuk mengantisipasi agar situasi di Semenanjung Korea kembali kondusif, pada bulan Oktober 1994 Amerika Serikat,

Jepang, Korea Utara, dan Selatan menandatangani perjanjian multilateral yang mengharuskan Korea Utara untuk memberikan akses kepada IAEA untuk memonitoring fasilitas nuklir yang dimiliki dengan imbalan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan akan memberikan dukungan energi dan membangun reaktor nuklir yang aman bagi Korea Utara. Perjanjian tersebut berhasil menghentikan Korea Utara memproses plutonium selama sembilan tahun (Scobell, Sanford, 2007: 74-75, Kearney, 2017: 30).

Perubahan kepemimpinan di Korea Selatan memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam upaya resolusi konflik dalam *track I*. Pada masa pemerintahan Kim Dae Jung yakni antara tahun 1998 sampai dengan 2003, sebagai upaya untuk membangun dialog dengan Korea Utara presiden Dae Jung menginisiasi "*Sunshine Policy*" yang salah satu komitmennya ialah membangun hubungan damai dan harmonis dengan Korea Utara (Myung, Jaffe, terj., Christine, 2013: 35). Salah satu yang menjadi poin penting dalam kebijakan ini ialah merespon segala bentuk aksi provokasi Korea Utara dengan cara *direct talk* dan *cooperation*. Meskipun hubungan antara Korea Utara dan Selatan pada periode ini mengalami banyak tantangan, namun pendekatan yang dilakukan oleh Korea Selatan cukup berhasil dalam mendorong pertemuan inter-korea atau *inter-Korean Summit* pertama kali sejak terjadinya Perang Korea pada tahun 2000 di Pyongyang (Jinju Kwon, 2014). Selain itu, "*Sunshine Policy*" juga menjadi cikal bakal terbentuknya *Kaesong Joint Industrial Complex* atau industri bersama antara Korea Utara dan Selatan yang dibuka di tahun 2004 (Kearney, 2017: 18). Kegiatan ini turut meningkatkan hubungan antar Korea dan semakin menguatkan hubungan kerjasama Politik dan Ekonomi antara Korea Utara dan Selatan pada waktu itu.

Ditengah-tengah hubungan yang harmonis antara Korea Utara dan Selatan, pada tahun 2001 terjadi perubahan pemimpin di Amerika Serikat dimana presiden George W. Bush mengambil alih kepemimpinan dan di tahun 2002 sempat memberikan label kepada Korea Utara bersama dengan Iran dan Iraq sebagai "*the axis of evil*", selain itu Bush juga

menyampaikan bahwa ketiga negara tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dunia (Kearney, 2017: 30). Hal membuat ketegangan di Semenanjung Korea yang pada akhirnya Korea Utara pada tahun 2003 memutuskan keluar dari NPT (*Non-Proliferasi Nuclear Treaty*) dan membuka kembali fasilitas nuklir yang sebelumnya ditutup (Worden, ed.2008: 262, Kearney, 2017: 75). Stabilitas keamanan di Semenanjung Korea mengalami tantangan yang cukup besar pada waktu itu, penguatan kekuatan militer oleh Korea Utara terus dilakukan mengingat Bush pada saat itu tengah melakukan invasi ke Irak guna meruntuhkan rezim Saddam Hussein. Hal ini turut menjadi ancaman bagi Korea Utara jikalau Amerika Serikat juga akan melakukan hal yang sama kepada rezim Kim yang berkuasa di Korea Utara (Kearney, 2017: 30-33).

Di tengah dinamika politik dan keamanan yang kompleks, Korea Selatan dibawah kepemimpinan Roh Moo-Hyun berusaha untuk memluas "*Sunshine Policy*" menjadi "*Policy for Peace and Prosperity*" untuk membangun hubungan dengan Korea Utara melalui persuasi, peredaaan tensi, dan kerja sama (Worden, 2008: 74, Kearney, 2017: 75). Pada masa Roh Moo-Hyun juga yaitu di tahun 2003 pertama kali diselenggarakan *Six Party Talk* sebagai forum multilateral guna membahas mengenai isu keamanan di Semenanjung Korea. Forum tersebut dilaksanakan pada tahun 2003, 2005, dan 2007 dengan berfokus pada upaya meyakinkan Korea Utara untuk menghentikan kegiatan proliferasi Nuklir mereka (Cronoin, ed. 2008 :84-94).

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan, tidak dapat dipungkiri bahwa dialog dan negosiasi yang dilakukan bukan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian melainkan untuk mencegah Korea Utara melakukan kegiatan dan peningkatan kekuatan militer baik dengan melakukan proliferasi Nuklir ataupun peluncuran rudal dan juga roket. Puncaknya ialah ketika di tahun 2009, Korea Utara melakukan peluncuran Roket jarak jauh. Korea Utara beralasan bahwa peluncuran tersebut tidaklah menyasar siapa pun atau negara manapun melainkan untuk tujuan yang damai dan sengaja diluncurkan ke luar angkasa atau orbit namun Dewan Keamanan PBB

tetap mengecam aksi tersebut dan Korea Utara meresponnya dengan memutuskan keluar dari Forum *Six Party Talk*.

Pada masa pemerintahan Obama, Amerika Serikat menolak untuk berbicara dengan Korea Utara sebelum Korea Utara terlebih dahulu melakukan denuklirisasi. Sedangkan dari perspektif Korea Utara, dialog dan negosiasi apapun tetap terbuka untuk Amerika Serikat, namun menolak untuk menghentikan program nuklir yang telah dijalankan. Hubungan yang terjalin antara Korea Utara, Selatan serta Amerika Serikat pasca keluarnya Korea Utara dari forum *six party talk* cenderung dingin. Setelah Korea Utara memutuskan untuk mengundurkan diri dari forum tersebut, niscaya tidak ada lagi forum multilateral yang dapat mempertemukan pihak yang berkonflik yakni Korea Utara dan Korea Selatan. Sedangkan dalam upaya Bilateral terbukti setelah masa pemerintahan Roh Moo Hyun tidak lagi efektif dan justru tindakan provokasi antara kedua negara semakin meningkat.

Pada tahun 2012, setelah Korea Utara meluncurkan roket tepatnya pada tanggal 25 Juli Korea Utara meminta adanya perjanjian damai kepada Amerika Serikat. Namun permintaan tersebut di tolak dan di tahun 2016 yang lalu Korea Utara kembali menginginkan perjanjian damai dan meminta kepada Amerika Serikat untuk terlibat dalam pembicaraan untuk menghentikan Perang Korea namun tetap ditolak. Penolakan tersebut dikarenakan Amerika Serikat menginginkan Korea Utara untuk menghentikan seluruh kegiatan militer dan melakukan denuklirisasi sebelum menginginkan dimulainya dialog (Megan Casella, Doina Chiacu, Reuters: 2016). Setelah kegagalan mencapai kesepakatan memulai dialog mewujudkan *peace treaty* bersama dengan Amerika Serikat, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada akhir bulan Januari 2016. Sebagai bentuk respon atas tindakan dari Korea Utara tersebut, pada bulan Februari dan Maret melalui kongres Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi kepada Korea Utara. Namun, sanksi tersebut direspon oleh Korea Utara dengan meluncurkan berkali-kali misil balistik pada bulan Maret 2016 (Jack Kim, Jumin Park, Reuters:2016).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui forum bilateral maupun multilateral tidak banyak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perdamaian di Semenanjung Korea. Meskipun dari seluruh pendekatan tersebut beberapa kali efektif memperbaiki hubungan antara kedua negara namun *national interest* tiap negara tetap menjadi yang paling dominan dibandingkan dengan tujuan utama itu sendiri yakni perdamaian. Selain itu, pembahasan forum dialog dan negosiasi tidak banyak membicarakan mengenai perdamaian, namun lebih banyak bertujuan untuk membahas mengenai masalah keamanan dan ancaman yang dalam hal ini bisa dikatakan lebih mengarah kepada *military and political approach* dibandingkan kepada *humanity approach* dan *building trust*.

Hal ini tentu sangat berbeda dengan yang seharusnya bahwa untuk menciptakan sebuah perdamaian di antara pihak yang berkonflik maka yang paling utama untuk dilakukan ialah bagaimana membangun kepercayaan diantara mereka sehingga kedepannya proses dialog dan negosiasi bisa berjalan dengan lebih baik. Hal ini kebalikan dari proses dialog yang selama ini dilakukan dalam rana *track I* yang mana masih belum terbangun rasa saling percaya dan justru rasa curiga serta perasaan terancam masih lebih kental dan mendominasi jalannya dialog.

#### **4.1.3. Keterlibatan Track II dalam Membangun Dialog Perdamaian di Semenanjung Korea**

Kawasan Asia Timur menjadi salah satu wilayah yang sampai saat ini masih terpengaruh dampak perang dimasa yang lalu, bahkan sebagai hasil dari sejarah perang dunia II dan dingin beberapa negara memiliki hubungan diplomatik yang sangat terbatas. Oleh karenanya, hingga saat ini tidak ada forum multilateral dimana pemerintah atau *track I* dapat berbicara mengenai masalah keamanan dan perdamaian di Asia Timur. Sehingga, Asia Timur dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang memiliki intensitas konflik tertinggi dengan peluang dialog yang rendah.

Dialog yang selama ini dilakukan dalam level *track I*, terlihat masih sangat susah dilakukan dan terkesan kurang efektif karena intensitas militer cenderung meningkat di kawasan salah satunya terkait isu nuklir yang menjadi ancaman di Semenanjung Korea dan kawasan. Sehingga, peran dari masyarakat sipil di Semenanjung Korea atau kawasan Asia Timur menjadi peluang dan sangat penting mengingat hubungan di level pemerintah masih banyak dipengaruhi dan dibayangi oleh *historical tension*. Untuk itu, posisi Masyarakat sipil sebagai *track II* di Semenanjung Korea ialah untuk membangun rasa percaya dan keyakinan diantara pihak yang ada dan membuka peluang untuk membicarakan isu sensitif yang bisa saja di tingkat pemerintah hal tersebut tidak dapat dilakukan

Pasca gagalnya forum “*six party talk*”, maka tidak ada lain forum yang dapat menjembatani dialog antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan juga Amerika Serikat. Selain itu, keberadaan *track I* dalam proses resolusi konflik dan dialog juga banyak dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara-negara tersebut. Adapun kepentingan nasional yang sangat jelas dapat dilihat ialah bagaimana Amerika Serikat lebih dominan berkaitan dengan masalah isu keamanan dan rivalitas dengan Tiongkok di kawasan Asia Timur. Sebagai negara yang sedang bersaing, Tiongkok dan Amerika Serikat tentu akan saling berupaya untuk menjadi negara yang mendominasi di kawasan Asia terbukti dengan kebijakan Barack Obama terkait “*Rebalance Asia*” sebagai upaya untuk menandingin kekuatan Tiongkok yang semakin besar (Sunders, 2014).

Selain itu, hubungan antara Jepang dengan kedua negara juga terjalin secara fluktuatif atau sifatnya *anmity-amity* sebagai hasil dari sejarah masa lalu dan juga ketegangan terkait kepemilikan pulau dokdo/takeshima dengan Korea Selatan menjadikan posisi Jepang kurang ideal untuk menjadi *broker* atau mediator (Katz, 2015). Jika merujuk pada banyaknya kepentingan negara-negara besar di Asia Timur, hal ini tentu akan berimplikasi terhadap upaya pelibatan negara-negara tersebut dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Keterlibatan negara-negara tersebut dalam proses perdamaian akan menjadikan upaya perdamaian di

Semenanjung Korea oleh *track I* hanya sebatas tawar menawar atau *bargaining* semata tanpa mencari jalan keluar yang efektif terkait permasalahan yang dihadapi.

Opsi lain yang dapat menjadi pilihan alternatif dalam membangun perdamaian di Semenanjung Korea tidak lain ialah melalui *track II* atau dengan melibatkan masyarakat sipil yang independen dan tidak memihak. Keterlibatan masyarakat sipil ini biasanya diistilahkan sebagai *track II Diplomacy* atau mengarah pada sebuah *unofficial meeting* antar perwakilan CSO dalam satu forum untuk membahas dan mendiskusikan sebuah isu atau permasalahan. Biasanya partisipan dari acara tersebut berasal dari latar belakang mantan pejabat pemerintah, atau para akademisi dan para *experts* yang kredibel di negaranya masing-masing. Selain itu, jika dibandingkan dengan *track I* dalam *track II diplomacy* lebih banyak memberikan kebebasan bagi para peserta untuk berpendapat dan berbicara terkait isu yang sensitif sekalipun yang biasanya terbatas atau terlarang di dalam forum dialog formal atau *track I* (Peter Jones, 2015).

*Track II* biasanya difasilitasi oleh masyarakat atau sifatnya *people to people exchange*. Sehingga, secara umum lebih fokus terhadap bagaimana membangun dan menyuarakan kehendak masyarakat dibandingkan dengan menginformasikan serta mengikuti *platform* pemerintah yang harus sesuai dengan kaedah peraturan dan juga mandat yang ada. Tidak jarang dalam pelaksanaannya *track II* berjalan dengan lebih santai dan tidak terkesan kaku karena melibatkan element budaya dan aktivitas olahraga yang memang dirancang untuk memanusiakan masyarakat dari negara lain dengan menghilangkan segala bentuk *stereotype* yang ada (Herbert C. Kelman, 1995:19-27). Saat ini terdapat beberapa kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam satu jaringan masyarakat sipil global yakni GPPAC (*Global Partnership for Prevention of the Armed Conflict*) yang berupaya untuk mencari peluang perdamaian antara Korea Utara dan Selatan melalui tingkatan *grassroot* atau pendekatan *people to people* di tengah kebuntuan *Track I*.

#### 4.1.3.1. Latar Belakang GPPAC dan Keterlibatan dalam Upaya Resolusi Konflik

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) merupakan jaringan masyarakat sipil global yang terbentuk sekitar tahun 2003 ketika Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan dalam laporannya di tahun 2001 menyerukan bahwa masyarakat sipil harus turut ikut berperan untuk mencegah terjadinya kekerasan bersenjata. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *conflict prevention* supaya tidak terjadi konflik ataupun peningkatan eskalasi konflik hingga menimbulkan kekerasan.

Hal yang menarik ialah GPPAC bekerja di tingkat atau level yang berbeda secara simultan atau serempak dengan anggota yang memiliki latar belakang beragam serta berasal dari komunitas lokal yang ada. Dalam menjalankan perannya, GPPAC melakukan pendekatan dari seluruh aspek baik etnik, politik, dan juga agama. Tidak jarang GPPAC membangun proses dialog dengan melibatkan pemerintah baik dalam tatanan lokal dan regional. Selain itu, dalam bekerja GPPAC juga banyak bekerja sama dengan PBB untuk beberapa isu strategis.

Kekuatan utama GPPAC ialah memberikan informasi dan alternatif perseptif terkait perdamaian dan *violence prevention* yang terkadang tidak dapat diperoleh dari pemerintah dan juga media. Misi utama GPPAC ialah membangun sebuah konsensus baru yang memungkinkan dilakukannya aksi bersama untuk mencegah konflik serta kekerasan dan mempromosikan perdamaian berdasarkan kawasan dan global. Oleh karenanya, GPPAC terbentuk sebagai sebuah jaringan organisasi masyarakat sipil yang tujuan pokoknya ialah mencegah peningkatan eskalasi konflik menjadi kekerasan baik di tingkat nasional suatu negara maupun global. Dalam menjalankan misinya, GPPAC berupaya untuk membangun sebuah *multi-stakeholder partnership* termasuk masyarakat sipil, pemerintah, organisasi regional, dan PBB. Hal ini dimaksudkan bahwa untuk menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya kekerasan, perlu dibangun kerjasama antara kelompok masyarakat di

dalam segala level mengingat perdamaian merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak.

Saat ini, GPPAC tumbuh menjadi jaringan masyarakat sipil global yang terdiri dari 15 kawasan dan memungkinkan seluruh organisasi dan masyarakat untuk bekerjasama membangun serta mengimplementasikan strategi guna mencegah konflik dan membangun perdamaian di seluruh dunia. Dalam menjalankan tugasnya sebagai sebuah jaringan masyarakat sipil global yang memiliki *concern* dalam upaya resolusi konflik, GPPAC berkerja melalui beberapa cara, antara lain (GPPAC Charter: 2017):

- a. Analisa Konflik
- b. Mediasi dan Dialog
- c. Pendidikan Perdamaian
- d. Menguatkan peran organisasai melalui pendekatan Gender
- e. *Human security strategies* atau pendekatan kemanusiaan

Struktur organisasi GPPAC sendiri terdiri dari dua jaringan yakni *regional network* dan *global network*. Adapun untuk *regional network*, GPPAC dipimpin oleh RSGs (*Regional Steering Groups*) dan untuk *global network* dipimpin oleh *Global Secretariat* yang berkedudukan di Belanda. Baik jaringan kawasan maupun global tetap diperbolehkan untuk membuka *partnership* dengan *stackholder* lainnya untuk turut berkontribusi dalam upaya resolusi konflik dan *peacebuilding*. Dengan demikian, GPPAC merupakan jaringan masyarakat sipil global yang sangat fleksibel dan memberikan peluang bagi masyarakat luas untuk turut berkontribusi menjalankan agenda utamanya yakni Perdamaian dan Resolusi Konflik.

Secara global, kegiatan adminstratif utama GPPAC terletak pada global sekretariat yang berada di Belanda. Adapun komposisi dari sekretariat global terdiri dari ISG (*International Steering Group*) dan susunan direksi seperti direktur eksekutif, dan lain sebagainya di bawah GPPAC *foundation*. GPPAC ISG (*International Steering Group*) beranggotakan minimal 15 orang yang masing-masing merupakan

perwakilan dari jaringan kawasan serta ditambah dengan maksimal 6 non-perwakilan regional.

GPPAC sekretariat global merupakan level tertinggi dalam GPPAC *foundation*, sementara ISG merupakan level tertinggi dari GPPAC *network*. Secara general, sasaran GPPAC sekretariat global ialah untuk berkontribusi dalam mencegah dan mentransformasi konflik dengan menginisiasi kegiatan serta memperkuat peran organisasi masyarakat sipil dalam upaya *peacebuilding*. Tidak jarang, GPPAC global melibatkan dan mengajak PBB untuk ikut terlibat dalam upaya resolusi konflik yang dilakukan oleh GPPAC. Dengan kata lain, GPPAC global memiliki akses yang cukup besar untuk masuk kedalam level *track I* baik berperan aktif atau hanya turut berpartisipasi dalam proses perdamaian yang ada.

GPPAC merupakan sebuah jaringan masyarakat sipil global yang bekerja dengan didasarkan kepada struktur kewilayahan. Adapun *regional structure* tersebut berfungsi untuk mengelolah dan menjalankan agenda resolusi konflik di wilayah dimana struktur tersebut berada. Hal ini dimaksudkan agar upaya perdamaian yang dilakukan lebih optimal dan mampu mengajak seluruh komponen masyarakat yang ada di tatanan *grassroot* untuk ikut berkontribusi menyelesaikan konflik dan mencegah kekerasan di wilayah mereka. Struktur kewilayahan dipilih guna memaksimalkan peran masyarakat sipil lokal untuk menyelesaikan masalah dimana mereka berada. Para anggota akan melakukan pertemuan secara berkala untuk saling bertukar informasi dan pengalaman serta membuat sebuah keputusan strategis terkait masalah yang ada di kawasan.

Dalam menjalankan agendanya, GPPAC kawasan dikendalikan oleh RSGs (*Regional Steering Groups*) yang anggotanya terdiri dari perwakilan GPPAC kawasan yang dipilih melalui proses yang demokratis. Perwakilan dapat menjadi anggota RSGs selama tiga tahun dan dapat digantikan atau diperpanjang sesuai dengan keputusan dari GPPAC kawasan. Tugas utama dari RSGs ialah sebagai *decision maker* GPPAC di kawasan, yang meliputi (GPPAC Charter: 2017):

- a. Membuat perencanaan jangka panjang tahunan GPPAC di kawasan. Adapun rencana jangka panjang yang dibentuk kurang lebih ialah selama 3 – 5 tahun sesuai dengan prioritas yang ingin dicapai terkait resolusi konflik di kawasan
- b. *Me-review* implementasi dari perencanaan yang telah dibuat dengan menggelar pertemuan tahunan
- c. Memilih perwakilan *International Steering Group* (ISG) yang nantinya akan ditempatkan di GPPAC *global secretariat* melalui proses yang demokratis dan transparan
- d. Berwenang untuk melakukan *examine and approve* bagi organisasi masyarakat sipil yang ingin bergabung menjadi anggota GPPAC.

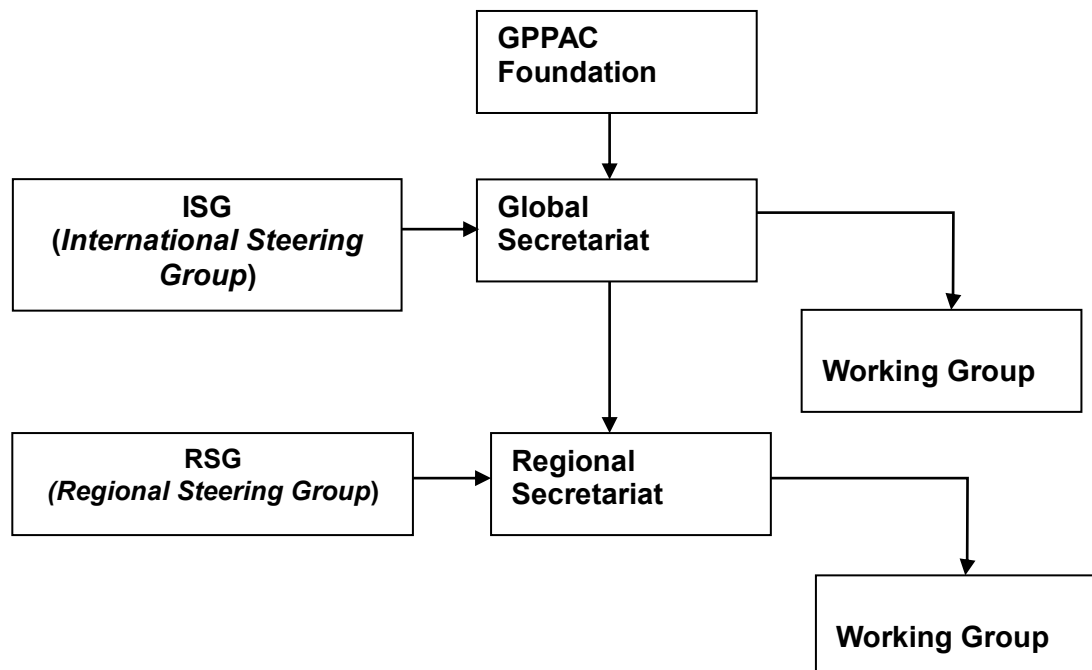
*Regional Secretariat* memainkan peran yang sangat penting dalam upaya resolusi konflik guna mencegah terjadinya konflik bersenjata dan kekerasan di Kawasan. Untuk menjalankan tugasnya, GPPAC kawasan memberikan mandat kepada *working group* yang menjadi bagian dari GPPAC kawasan. Adapun *working group* ini terdiri dari organisasi masyarakat sipil yang anggotanya memiliki berbagai latar belakang baik akademisi, ahli, dan mantan petinggi pemerintahan. Saat ini, GPPAC memiliki sekitar 15 *regional secretariat* yang meliputi wilayah Amerika Latin & Karibia, Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Tenggara yang meliputi negara Balkan, Eropa Timur, Kaukasus, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur Laut, Kepulauan Pasifik, Timur Tengah & Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah & Timur, dan Afrika Selatan (GPPAC Charter: 2017).

Seluruh jaringan tersebut bekerja dengan didasarkan kepada isu keamanan dan konflik di kawasan masing-masing. Apabila merujuk kepada konflik di Semenanjung Korea, GPPAC NEA (*Northeast Asia*) merupakan jaringan yang menginisiasi proses perdamaian antara kedua Korea. GPPAC NEA diluncurkan pada tahun 2005 di Jepang dan pada tahun 2006 mulai meluncurkan *regional work plan* terkait perdamaian di Semenanjung Korea (<https://www.peaceportal.org/web/gppac-northeast-asia/gppac-nea>, diakses 4 November 2017). GPPAC *North East Asia*

mencoba untuk menginisiasi perdamaian di kawasan yang masih sangat terkarakterisasi oleh struktur perang dingin dan dihadapkan oleh beberapa krisis seperti ancaman nuklir dan juga sengketa wilayah. Tujuan utama dari GPPAC NEA ialah untuk menguatkan ikatan masyarakat sipil dan membuka komunikasi dengan pemerintah terkait masalah keamanan dan perdamaian di kawasan (<https://www.peaceportal.org/web/gppac-northeast-asia/gppac-nea>, diakses 4 November 2017).

Masih kentalnya pengaruh perang dunia II dan perang dingin di kawasan Asia Timur menjadikan perkembangan masyarakat sipil cukup terhambat. Masalah terkait ancaman dan keamanan menjadi isu yang paling besar di kawasan, hal ini berpengaruh kepada komunitas masyarakat sipil di kawasan yang lebih banyak fokus terhadap upaya resolusi konflik yang sifatnya lebih bertujuan preventif yakni agar konflik tidak tereskalasi hingga terjadi perang dan kekerasan di kawasan. Dalam menjalankan fungsinya, GPPAC NEA memberikan mandat kepada beberapa *working group* yang antara lain *Peace Boat* dan *Blue Banner* untuk menjalankan proses dialog dan pertemuan membahas mengenai kemungkinan perdamaian di Semenanjung Korea. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, struktur GPPAC kawasan dan global dapat dilihat melalui bagan berikut:

**Bagan 4. 1 GPPAC Networking**



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2017)

## 4.2. Analisis Data dan Hasil Penelitian

### 4.2.1. Proses Dialog oleh *Track I*

Proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan yang sifatnya *G to G* bukan tidak pernah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses ini sudah pernah dilakukan oleh Korea Utara dan juga Korea Selatan beberapa waktu yang lalu. Mekanisme pendekatan pun dilakukan dengan berbagai macam cara baik melalui mekanisme ekonomi, sosial budaya, dan juga politis. Namun, pergantian kepemimpinan khususnya di Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang berpengaruh di Semenanjung Korea turut berimplikasi terhadap proses rekonsiliasi dan upaya perdamaian antara Korea Utara dan Selatan. Oleh karena itulah, tidak jarang proses *track I* seringkali mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan *track I* dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea ialah ketika proses *six party talk* tidak lagi efektif dan terhenti ketika Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan tersebut di tahun 2009. Terhentinya perundingan

tersebut otomatis menjadikan proses perdamaian dalam rana *track I* sudah tidak lagi dapat diharapkan.

Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) menyatakan bahwa kegagalan dalam proses *six party talk* tersebut tergantung kepada pendekatan dan mekanisme yang dilakukan. Mengingat, pada awalnya *six party talk* dibentuk karena adanya kepekaan dan kesediaan anggota *six party talk* yakni Korea Selatan, Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, dan Rusia untuk membantu kekurangan Korea Utara dari sisi ekonomi, kesehatan, energi, dan lain sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu negara-negara *six party talk* tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, desakan negara *six party talk* agar Korea Utara menghentikan seluruh kegiatan militernya semakin membuat posisi Korea Utara terpojok. Sanksi-sanksi pun banyak diberikan dengan harapan jika kondisi Korea Utara semakin terpuruk maka pertimbangan politiknya ialah akan terjadi pergantian atau perubahan rezim di Korea Utara. Namun, kenyataannya ialah *resilience* Korea Utara sangat kuat ditengah kesulitan negaranya dan sanksi oleh dunia Internasional.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa posisi *six part talk* bukan merupakan upaya untuk inisiasi perdamaian namun lebih banyak berkaitan dengan urusan *national/ state security* dan keinginan negara-negara besar untuk mengubah rezim yang ada di Korea Utara. Hal ini didukung Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) bahwa tidak jarang *track I* tidak memberikan solusi dan sangat kecil pengaruhnya dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini tidak lain dikarenakan hubungan yang dibangun dalam level tersebut sifatnya "*polirizing*" atau terpolarisasi. Negara besar tentu akan mengambil alih proses dialog dan sebisa mungkin akan mengarahkan dialog tersebut sesuai dengan kepentingan mereka. Jane (Wawancara, 17 September 2017) juga berpendapat bahwa tidak jarang dalam proses *track I* baik Korea Utara dan Selatan tidak bebas untuk mengutarakan pendapatnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip utama dalam resolusi konflik yang perlu untuk mendengarkan dan melihat banyak perspektif agar melahirkan

banyak opsi, sehingga kemungkinan rekonsiliasi dan perdamaian pun akan semakin besar.

Malik (*Forum Group Discussion* LEMHANAS, 25 Juli 2017) mengatakan bahwa proses perdamaian memiliki dua muka yakni tujuan dan proses. Jika melihat pada sistem Internasional yang ada, perdamaian tidak akan pernah menjadi tujuan karena bagi *track I* khususnya proses untuk berdamai itulah yang menjadi lebih penting. Selama ini proses perdamaian di Semenanjung Korea terkesan *stagnant* atau tidak bergerak karena pada dasarnya dialog tidak akan pernah efektif jika diplomasi yang dilakukan tetap bersifat *stick and carrot*. Pendapat tersebut didukung oleh Kussuji (*Forum Group Discussion* LEMHANAS, 25 Juli 2017) yang menyatakan bahwa *track I* akan sulit jika digunakan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di Semenanjung Korea karena hubungan Korea Utara dan Selatan banyak dipengaruhi oleh kepentingan negara adikuasa seperti Tiongkok dan Amerika Serikat di Kawasan. Hubungan yang “saling menggoda” antara Korut dan Korsel, dimana ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir atau rudal, maka Korea Selatan akan meresponnya dengan melakukan kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan kondisi *arm race* tidak dapat dihindari dan turut menyumbang ketegangan di Semenanjung Korea.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya proses perdamaian di Semenanjung Korea dalam rana *track I* atau *G to G* tergantung pada lingkungan geopolitiknya. Selain itu menurut Pattiradjawane (*Forum Group Discussion* LEMHANAS, 25 Juli 2017), yang mempengaruhi kegagalan *track I* ialah sifat populis diplomasi Amerika Serikat yang sangat transaksional. Hal itu akan semakin membuat posisi Amerika Serikat kehilangan kekuatan secara diplomatis dalam proses *track I Diplomacy*. Sehingga, akan sangat susah untuk memulai kembali proses *six party talk* karena forum tersebut sudah lama terhenti dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada Korea Utara memungkinkan negara tersebut akan skeptis kepada proses *six party talk* apabila dimulai kembali.

Selain itu, upaya untuk perdamaian melalui opsi politik juga akan lebih susah setelah terjadi pergantian rezim baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Apabila berbicara dalam rana politik negara, maka menurut Widjajanto (*Forum Group Discussion LEMHANAS*, 25 Juli 2017) satu-satunya opsi yang dapat dilakukan ialah opsi militer. Adapun opsi ini merupakan kemungkinan opsi paling buruk karena bisa memunculkan kepanikan oleh Korea Utara sehingga meluncurkan berbagai macam senjata yang masih belum memiliki kendali yang baik, sehingga bisa saja meluncur kemanapun tanpa target yang jelas. Jika opsi ini yang digunakan, maka yang terjadi ialah Perang terbuka untuk unifikasi Korea dan menggulingkan rezim yang ada.

Opsi militer tersebut merupakan opsi terburuk yang hanya terjadi apabila melibatkan *track I*. Namun, opsi terburuk tersebut sebisa mungkin harus dihindari, dimana apabila masih ada opsi lain yang bisa dipilih mengapa harus dengan menggunakan opsi militer. Dalam hal ini, strategi dan taktik untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tidak harus dihadapi secara linier yakni hanya melihat peran dari *track I* saja namun juga harus melihat aspek internasional dan aktor perdamaian secara luas.

Prinsipnya, perdamaian bukan hanya urusan negara namun juga merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup dalam suasana tenang dan tanpa gangguan. Perdamaian merupakan *nature* manusia, dan banyak cara untuk mendapatkan perdamaian yang diinginkan. Oleh karena itulah, perdamaian bukan hanya tanggung jawab negara, atau individu saja namun juga tanggung jawab manusia sebagai makhluk universal. Upaya perdamaian dalam bingkai *track I diplomacy* tidak efektif karena dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara-negara yang terlibat. Oleh karenanya, opsi lain yang dapat diupayakan untuk menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah melalui track II yakni melalui pendekatan *people to people* yang mengedepankan hubungan formal atau informal melalui budaya dan dialog serta mengedepankan *human security* bukan lagi *national security*. Menurut Malik (Wawancara,

05 Desember 2017), upaya tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar untuk memulai proses perdamaian di Semenanjung Korea melalui rana yang paling bawah yakni *grassroot*.

#### **4.2.2. Bentuk Keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*)**

Merupakan hal yang sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan hanya menggunakan rana negara saja atau *track I*. Dalam pengertian bahwa *C to C* atau *Community to Community* juga bisa menjadi cara yang menarik untuk membangun perdamaian ditengah proses perdamaian melalu level *track I* yang sudah terhenti. Keterlibatan CSO (*Civil Society Organization*) dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea menjadi sebuah harapan baru bagi terbentuknya rekonsiliasi kedua negara melalui level *track II*. Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017 ), masyarakat sipil merupakan kekuatan yang dahsyat dan mereka berusaha agar sebuah konflik tidak terjadi dan tereskalasi ke tingkat yang lebih besar hingga memicu kekerasan. Apabila gerakan masyarakat sipil tersebut beresatu maka hal tersebut bisa menjadi faktor penggerak bagi *track I*.

Masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan membuka pintu ruang dialog bagi pihak yang berkonflik. Secara jelas Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) menyatakan bahwa “saya pesimis terhadap track I, jika pesimis juga terhadap track II maka kepesimisan tersebut akan mendorong terjadinya peperangan”. Dengan demikian, *2<sup>nd</sup> track* bisa menjadi sebuah *opportunity* ditengah kebuntuan yang ada. Hal ini karena masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan mampu untuk memberikan pandangan serta perspektif yang luas. Apabila Negara atau *track I* bekerja sesuai dengan kaedah institusi dan kenegaraan, maka CSO tidak ada batasan untuk mencari ide dan trobosan, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang baru yang mungkin belum pernah terbayangkan atau terpikirkan sebelumnya.

Malik (Wawancara, 05 Desember 2017) mengatakan bahwa saat ini proses inisiasi perdamaian oleh masyarakat sipil dilakukan bukan

dengan *grand design planning* yang sifatnya “*truth reconciliation*”, melainkan dilakukan dalam bentuk-bentuk yang parsial namun tetap mengarah pada satu tujuan yakni perdamaian di Semenanjung Korea. Menurut Malik (Wawancara, 05 Desember 2017) terdapat empat hal yang paling penting dalam inisiasi perdamaian melalui level *people to people* atau *grassroot* antara lain ialah:

- a. *Family Reunion* atau Reuni Keluarga yang terpisah akibat Perang di tahun 1950-an
- b. *Joint Economic Activity* melalui pengembangan *Kaesong Industrial Complex*
- c. Pertemuan budaya Korea Utara dan Selatan
- d. Gerakan wanita dalam upaya *peacebuilding* atau *Female Peacebuilder*

Baik Korea Utara maupun Korea Selatan, CSO yang berpartisipasi dalam proses inisiasi perdamaian banyak berasal dari lembaga perguruan tinggi. Di Korea Utara misalnya, terdapat KNPC (*Korea National Peace Committee*) yang basisnya berasal dari para akademisi atau Universitas meskipun mereka bekerja di bawah pemerintah namun KNPC masih membuka peluang dialog tetapi basisnya tetaplah melalui Universitas.

Menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), secara umum yang ingin dicapai oleh masyarakat sipil dalam upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah terciptanya *peace agreement* oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Kemudian apabila perjanjian tersebut telah tercapai, diharapkan dapat terbangun *regional peace rezim* dan meminimalisir pengembangan dan juga penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Timur atau *East Asia Nuclear Freezone*. Adapun bentuk keterlibatan masyarakat sipil untuk menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea dilakukan dengan cara *working group dialog* dan *mediation*. Hal ini penting untuk dilakukan guna membangun *trust* diantara pihak yang berkonflik. Jika sudah terbangun *trust* tersebut maka akan lebih mudah untuk menemukan *we-ness* atau *together-ness*. Hal inilah yang diharapkan mampu terwujud melalui proses dialog yang diinisiasi oleh masyarakat sipil (Malik, Wawancara, 5 Desember 2017 ).

Belajar dari konflik di Maluku Indonesia, proses perdamaian dimulai melalui dialog oleh masyarakat sipil dan akademisi hingga memunculkan perasaan *we-ness* melalui prinsip tradisional atau kearifal lokal masyarakat yang diistilahkan sebagai *pela-gandong* yang artinya persaudaraan-sekandung (Malik, 2017: 168-169). Hal yang sama juga berusaha untuk diaplikasikan di Semenanjung Korea dimana proses dialog dan juga negosiasi yang dilakukan diharapkan dapat memunculkan *cheong* atau *shimcheong* yang merupakan istilah untuk menggambarkan hubungan emosional diantara orang Korea sehingga memunculkan rasa *we-ness* atau kekitaan (Sang-Chin Choi, Gyuseong Han, 2008: 205-206).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) bahwa masyarakat sipil apabila bergabung sebagai sebuah jaringan, maka posisinya akan cukup kuat untuk mendorong pihak yang ada khususnya *track I* untuk memulai kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) bahwa saat ini CSO di Semenanjung Korea tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah maka mereka harus mampu membangun jaringan dengan CSO Internasional yang memiliki afiliasi dan kelompok multilateral lainnya seperti PBB dan juga organisasi regional lainnya. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan tekanan yang lebih besar dan kuat yang dapat mendorong *track I* untuk memulai kembali proses dialog.

Dalam menginisiasi perdamaian di Semenanjung Korea, GPPAC berusaha untuk membangun *trust* pihak yang berkonflik dengan melibatkan mereka dalam sebuah proses dialog dan mediasi. Menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), sangat susah untuk membangun kepercayaan kepada KNPC atau Korea Utara dimana perlu waktu lama hampir lebih dari 1 tahun hingga akhirnya mereka ikut berpartisipasi dalam dialog yang dilakukan di Ulaanbatar, Mongolia. Hingga saat ini, proses dialog tersebut telah berlangsung tiga kali yakni di tahun 2015, 2016, dan terakhir di tahun 2017. Dalam proses keterlibatannya, GPPAC melakukan inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui empat aspek yakni

regional, formal, pendekatan jangka panjang (terus melakukan pertemuan berkala), dan konsistensi komitmen. Untuk itu, agar efektif GPPAC juga melakukan pendekatan formal dan inter-kawasan dengan mencoba menggandeng UNICEF, WHO, dan organ PBB lainnya dalam menjalankan inisiasinya.

Untuk menjalankan kegiatannya, proses dialog dan mediasi oleh GPPAC di Semenanjung Korea diatur oleh *Peace Boat* dan *Blue Banner* yang mana seluruh anggotanya mayoritas berlatar belakang akademisi dan para ekspertis atau ahli. Tujuan yang paling penting dalam proses dialog tersebut ialah bagaimana menciptakan ruang untuk dialog di kawasan Asia Timur yang melibatkan dua pihak berkonflik yakni Korea Utara dan Selatan. Adapun proses dialog tersebut menjadi sebuah awal dari kedua Korea untuk bertemu dalam satu forum bersama tanpa adanya kekangan dan intervensi dari negara-negara besar. Menurut Jane (Wawancara, 17 September 2017), GPPAC ialah jaringan masyarakat global dan kawasan yang mampu untuk membawa kedua Korea berada dalam satu meja yang mana dalam *normal political setting* kedua pihak ialah *complitely enemy* dan bahkan mereka tidak diperbolehkan bertemu satu sama lainnya. Ulaanbatar dialog menjadi ruang dimana kedua belah pihak dapat bertemu secara berkala dan dapat membawa mereka bersama-sama untuk melanjutkan pertemuan dan percakapan setiap saat. Seperti yang dikutip dalam pernyataan Jane (Wawancara, 17 September 2017) bahwa:

*“there is a real sense of understanding and trust and friendship in the room as well, which is allowing discussion on very sensitive issues which may be in a more official setting you would not be possible at all to speak about it”.*

Proses pertemuan dan dialog seperti itu diharapkan akan membangun rasa kebersamaan atau *cheong* yang sebelumnya dinyatakan oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017). Meskipun dalam dialog tersebut membahas banyak hal dan tidak hanya khusus membahas

mengenai masalah di Semenanjung Korea, namun setidaknya kedua belah pihak yakni Korea Utara dan Korea Selatan dapat dipertemukan dalam satu forum. Dengan demikian, dialog Ulaanbatar menjadi salah satu fasilitator dan turut mendorong terbangunnya rasa kebersamaan serta *cheong* atau *simcheong* yang mungkin sudah lama hilang akibat konflik. Strategi tersebut oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) diistilahkan sebagai “strategi bubur panas” yakni tidak langsung ke inti permasalahan tetapi setidaknya kedua belah pihak bertemu dan saling berinteraksi satu sama lain meskipun dalam dialog tersebut membahas berbagai macam isu keamanan lainnya di kawasan Asia Timur.

#### **4.2.3. Dinamika Serta Tantangan GPPAC**

Konflik di Semenanjung Korea merupakan salah satu konflik yang berkepanjangan dan hingga sampai saat ini masih belum menemukan titik penyelesaian. Kompleksitas hubungan antar aktor di kawasan yakni Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Tiongkok membuat proses penyelesaian konflik semakin sulit untuk dilakukan. Merujuk pada pendapat dari Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) yang menyatakan jika salah satu yang menjadikan kawasan tersebut sangat rawan ialah adanya kenyataan bahwa Korea Utara menghadapi *statement-statement* permusuhan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat. Tercatat beberapa kali secara spesifik Amerika Serikat menyatakan bahwa Korea Utara adalah *rock state* yaitu negara yang patut untuk dibinasakan.

Masalah yang kemudian muncul ialah, untuk negara yang sudah mendapatkan ancaman seperti itu maka mereka akan mencari cara untuk *survive*. Menurut Wibisono (Wawancara, 14 September 2017) merujuk pada hukum internasional pasal 51 menyatakan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan cara peperangan dan kekerasan dalam rangka *self defense* atau mempertahankan diri. Sehingga, selama ada situasi yang dianggap sebagai sebuah ancaman maka Korea Utara bisa melakukan persiapan untuk menggunakan cara-cara militer. Dengan demikian, jika didasarkan pada hukum justifikasi hal tersebut diperbolehkan.

*Arm race* atau perlombaan persenjataan di Semenanjung Korea yang hingga saat ini masih berlangsung dengan intensitas yang cukup tinggi merupakan hasil dari kegagalan kedua negara untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Sehingga, secara administratif kedua pihak masih dalam status berperang. Kondisi inilah yang ingin dirubah oleh masyarakat sipil dalam hal ini GPPAC, dimana untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik di kemudian hari maka perdamaian di Semenanjung Korea merupakan hal yang *urgent* dan perlu untuk diupayakan. Hal ini serupa dengan pendapat yang diutarakan oleh Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) yang menyatakan bahwa permasalahan di Semenanjung Korea merupakan hal yang *urgent* karena konflik tidak dapat diprediksi dan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Apabila konflik tersebut pecah menjadi perang bersenjata maka yang akan terjadi ialah *massive negative impact* dan tentu akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan global. Untuk itu, sebelum terjadi hal tersebut, tindakan preventif merupakan hal yang perlu untuk diupayakan yang mana salah satu bentuk dari tindakan preventif tersebut ialah dengan mengupayakan iniasi perdamaian di semenanjung Korea oleh *track II* ditengah kebuntuhan *track I*.

Meskipun demikian, upaya yang dilakukan bukannya tanpa dinamika dan tantangan. Berdasarkan pernyataan dari Malik (*Forum Group Discussion LEMHANAS*, 25 Juli 2017) menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam upaya perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu diantaranya yang sangat kuat ialah terkait masalah “*collective memory*” baik Korea Utara dan juga Selatan yang keduanya merasa menjadi korban dari Perang. Selaras dengan pendapat dari Jane (Wawancara, 17 September 2017) bahwa Semenanjung Korea merupakan salah satu wilayah yang hubungan antara negaranya masih banyak dipengaruhi oleh ingatan masa lalu terkait perang. Hal ini lah yang kemudian mempengaruhi hubungan diplomatik negara kawasan Asia Timur yang tidak terlalu terjalin dengan baik. Tidak mudah untuk

menghapus ingatan permusuhan tersebut, dan tentunya perlu waktu yang cukup lama.

Adapun dinamika serta tantangan lainnya yang dihadapi oleh GPPAC dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea menurut Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017) diantaranya ialah semakin mengecilnya kelompok masyarakat di Korea Selatan khususnya generasi muda yang menginginkan reunifikasi di Semenanjung Korea. Selain itu, untuk membangun kepercayaan dengan Korea Utara sangatlah susah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun demikian, melalui pendekatan ke Universitas GPPAC telah mendapatkan kepercayaan dari CSO yang ada di Korea Utara dan memungkinkan mereka untuk ikut dalam proses dialog yang dilakukan.

Dinamika lain yang dialami oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah terkait masalah pendanaan. Banyak pendonor yang berpikir ulang untuk memberikan sumbangan dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Banyak diantara mereka yang “skeptis” terhadap Korea Utara dan menganggap bahwa Korea Utara merupakan negara yang buruk yang selalu mendapatkan sanksi dari dunia Internasional.

Selain itu, tindakan provokasi Donald Trump terhadap Korea Utara beberapa waktu yang lalu menjadikan intensitas ketegangan di Semenanjung Korea meningkat. Hal ini lah yang sebetulnya ingin dihindari, dimana ketegangan dan provokasi kecil bisa saja suatu saat menjadi besar dan membuka pintu peluang terjadinya konflik yang berujung pada kekerasan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) bahwa kepemimpinan seseorang dalam suatu negara memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah proses rekonsiliasi. Trobosan oleh pemimpin merupakan hal yang paling penting dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea pada saat ini.

Meskipun demikian, ditengah tantangan dan dinamika yang dihadapi GPPAC tetap mengupayakan inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea dengan melibatkan jaringan masyarakat sipil di

kawasan dan tentunya mengikutsertakan baik Korea Utara dan Selatan dalam satu forum dialog. Bagi Van Tuijl (Wawancara, 13 Oktober 2017), kehadiran masyarakat sipil sebagai bagian dari *track II* merupakan sebuah alternatif untuk mendukung *track I* yang sudah terhenti sejak lama. Namun, upaya yang dilakukan oleh *track II* tidak akan cukup untuk benar-benar mampu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea, karena tujuan awal dari *track II* sendiri menginisiasi perdamaian melalui dialog untuk mencegah agar konflik tidak tereskalasi dan menghindari konflik bersenjata di kawasan. Namun, tetap mendorong agar pemerintah dalam hal ini *track I* kembali berfungsi dan memulai kembali dialog untuk rekonsiliasi dengan satu tujuan yang sama yakni perdamaian bukan hanya terkait *national security* saja. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh *track II* haruslah berjalan beriringan dengan *track I* karena pada dasarnya kedua pendekatan tersebut merupakan sebuah kombinasi yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Jika *track II* bergerak pada level yang sifatnya non-formal dengan melakukan pendekatan melalui *grassroot*, maka *track I* bergerak pada level formal yang mengupayakan perdamaian dari sisi kebijakan strategis berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Keterlibatan GPPAC dalam Inisiasi Proses Perdamaian di Semenanjung Korea**

Ketegangan yang semakin hari kian meningkat di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan dapat menjadi sebuah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Ketegangan di Semenanjung Korea tidak lain merupakan keberlanjutan dari Perang Korea yang terjadi pada tahun 1950 dan berakhir pada tahun 1953 setelah kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata. Lebih dari 60 tahun berakhirnya perang Korea, kedua negara masih belum menyepakati perjanjian damai.

Dengan demikian, secara administratif kedua negara masih dalam status berperang. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan persepsi

ancaman kedua belah pihak, sehingga perlombaan senjata dan provokasi pun tidak dapat dihindari. Apabila hal tersebut terus terjadi dan berulang-ulang dengan intensitas yang cukup tinggi, maka bukan tidak mungkin perang akan ekan kembali terjadi di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, merujuk pada konsep *preventive diplomacy* maka perlu adanya upaya untuk mencegah agar konflik tersebut tidak tereskalasi dan berdampak bagi stabilitas keamanan global dengan cara-cara yang diplomatik atau *non-violence*.

Untuk itu, beberapa kali dilakukan upaya untuk melakukan proses perdamaian di Semenanjung Korea. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menyelenggarakan perundingan *six party talk* dengan melibatkan enam negara yakni Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara. Namun, perundingan tersebut resmi dihentikan pada tahun 2009 setelah Korea Utara memutuskan untuk keluar, sehingga sampai saat ini masih belum ada interaksi diplomatik yang serius untuk mencari solusi damai.

Gagalnya perundingan *six party talk* memberikan implikasi terhadap semakin memanasnya hubungan kedua negara. Hubungan kedua negara kian meningkat ketika Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan bekerjasama untuk membangun Instalasi Sistem Perlindungan Rudal Baru atau *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) dan pengiriman kapal perang *carl vinson* di perairan semenanjung Korea untuk mengantisipasi program uji coba nuklir dan rudal balistik Korea Utara (Noerper, *Comparative Connection Pasific Forum CSIS*, Vol. 19, No. 1, May 2017 : 36). Disisi lain, dibangunnya THAAD juga mendapatkan respon yang kurang baik dari Tiongkok karena dianggap sebagai ancaman kepentingan strategisnya (*Institute for Security & Development Policy*, Oktober 2017). Selain itu, Jepang yang juga menjadi salah satu bagian dari *security umbrella* Amerika Serikat bersama dengan Korea Selatan juga cenderung tidak lagi mampu menahan diri dari perang.

Perkembangan konflik di semenanjung Korea beberapa tahun terakhir memang cenderung susah untuk diprediksi dan eskalasi yang

terus meningkat perlu dilakukan langkah antisipasi atau *preventive*. Perselisihan Korea Utara dan Selatan perlu mendapatkan perhatian khusus karena merupakan ancaman bagi kawasan Asia dan global. Tercatat pada masa pemerintahan Kim Jong Un, Korea Utara beberapa kali telah melakukan uji coba nuklir yakni di tahun 2013, 2016, dan 2017. Korea Utara merupakan negara komunis yang meskipun lemah secara ekonomi, namun memiliki kemampuan rudal dan nuklir yang memiliki daya jelajah cukup jauh. Hal ini berbeda dengan Korea Selatan yang menganut paham demokrasi dan memiliki kekuatan ekonomi nomor 12 di dunia, sedangkan dari sisi militer Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Perbedaan politik dan adanya campur tangan kepentingan eksternal (Amerika Serikat) menjadi salah satu kendala untuk perwujudan perdamaian di semenanjung Korea melalui level *track I* atau melibatkan negara. Tercatat beberapa kali dilakukan upaya resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui level *track I* yang antara lain ialah sebagai berikut:

- a. Tahun 1994 dilakukan penandatanganan kesepakatan antara pemerintah Korea Utara dan Amerika Serikat mengenai penghentian program nuklir dan pemberian bantuan ekonomi untuk Korea Utara. Namun program tersebut gagal karena tidak adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak
- b. Tahun 1998 Korea Selatan menginisiasi dilakukannya reunifikasi Korea melalui dialog bilateral, investasi ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun inisiasi tersebut terwujud dalam kebijakan *sunshine policy*, namun kembali lagi gagal setelah terjadi perubahan arah kebijakan Korea Selatan karena adanya perubahan kepemimpinan dari Lee Myung Bak ke Park Geun Hye serta adanya aksi militer yang dilakukan oleh Korea Utara
- c. Tahun 2003-2012 membentuk *six party talk* sebagai kerangka diplomasi multilateral untuk mewedahi kekuatan besar yang berkepentingan untuk membicarakan langkah strategis menuju perdamaian di Semenanjung Korea. Namun upaya ini mengalami

kegagalan karena komitmen yang lemah dari negara yang terlibat, sehingga forum tersebut tidak menghasilkan efektifitas. Mengingat dalam forum tersebut, negara yang terlibat memiliki kepentingan nasional masing-masing.

Pada tahun 2017, percobaan nuklir dan uji coba senjata balistik serta rudal semakin intensif namun sebagian diantaranya mengalami kegagalan baik karena tidak mencapai target sasaran atau meledak tidak sesuai dengan perhitungan. Namun, kegagalan tersebut justru semakin menjadi motivasi bagi Korea Utara untuk terus mengembangkan kemampuan persenjataan yang dimiliki. Korea Utara beberapa kali meluncurkan satu peluru kendali yaitu *Hwasong-4* yang di *claim* mampu mencapai alaska dan mencapai titik selatan pulau Jawa Indonesia.

Rasa ketidakpercayaan, curiga, ancaman, retorika, dan segala rasa ketakutan akan eskalasi militer yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Semenanjung Korea merupakan sebuah *lock point* akibat interaksi politik era perang dingin pada masa lampau. Lingkungan geopolitik yang semakin fluktuatif dimana sikap pemerintah Amerika Serikat yang kian agresif terhadap Korea Utara menjadikan Semenanjung Korea menjadi sebuah titik rawan akan terjadinya perang. Jika fenomena tersebut dilihat dalam sebuah sudut pandang perdamaian, bisa dikatakan bahwa ketidakstabilan di Semenanjung Korea terjadi akibat kurangnya komitmen serta keberlanjutan terkait visi bersama tentang masa depan yang damai dan aman.

Merujuk pada konsep *diplomacy preventif* Ramcharan (2008), situasi keamanan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan menjadi sebuah hal yang sifatnya *urgent* dan perlu untuk diselesaikan. Konfrontasi dan tindakan saling mengancam kedua belah pihak yang terjadi secara berkala merupakan sebuah *erly warning* bagi pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi alternatif resolusi konflik ditengah kenyataan bahwa proses perundingan dan dialog dalam level *track* sudah tidak lagi berjalan. Fakta tersebutlah yang kemudian memunculkan sebuah alternatif untuk melibatkan masyarakat sipil untuk ikut berperan

dalam proses resolusi konflik di Semenanjung Korea melalui pendekatan *track II* dengan menyoar *grassroot*.

Sejak terhentinya *six party talk* di tahun 2009, masyarakat sipil mencoba untuk melakukan inisiatif yang menjadi langkah awal untuk membangun kembali dialog dalam level *track II* yang sebelumnya terhenti di level *track I*. Pada dasarnya, proses inisiasi perdamaian oleh masyarakat sipil dilakukan secara *parsial* atau bukan dalam satu bentuk *grand design reconciliation*. Adapun bentuk-bentuk bagaimana masyarakat sipil dilibatkan dalam proses inisiasi perdamaian diantaranya ialah dengan menginisiasi pertemuan keluarga oleh Palang Merah Internasional, pertukaran budaya, dan dialog-dialog lainnya. Meskipun dilakukan secara parsial, hal tersebut tetap mengindikasikan bahwa masih ada komitmen yang kuat dari masyarakat sipil untuk berusaha mencairkan ketegangan dan menyelesaikan konflik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih sosial dan kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan teori Resolusi Konflik yang menyatakan bahwa untuk mencapai sebuah resolusi maka perlu adanya komitmen pihak yang ada untuk bersama-sama mencari jalan keluar untuk menghasilkan *win-win solution*. Adapun solusi yang sifatnya *win-win* tersebut tergantung pada konstelasi kepentingan pihak yang terlibat (Jeong, 2010:11).

Dari sini bisa dikatakan bahwa masyarakat sipil dengan pendekatan *grassroot* dirasa menjadi pilihan alternatif yang tepat untuk proses resolusi konflik di Semenanjung Korea. Posisi masyarakat sipil dirasa akan lebih sesuai karena tidak memiliki banyak kepentingan politis. Hal ini berbeda dengan *track I* yang tentu dalam proses perundingannya banyak didasarkan kepada pertimbangan *cost and benefit* terkait *national interest* yang dimiliki oleh masing-masing negara. Hal ini lah yang menjadikan proses dalam level *track I* tidak efektif dan pada akhirnya terhenti karena adanya satu pihak yang bisa saja merasa tidak puas dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam keterlibatannya, masyarakat sipil biasanya menggunakan cara-cara yang sifatnya *non-confrontation* atau lebih banyak melalui

kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar CSO yang ada mampu untuk mengikat masyarakat sipil atau CSO dinegara yang menjadi pihak berkonflik ke dalam sebuah *framework* yang sama, dengan harapan akan tercipta *trust* dan *mutual understanding*. Hal ini sesuai dengan teori resolusi konflik itu sendiri yang menyatakan bahwa hal mendasar dan yang paling penting dalam upaya resolusi konflik guna mencapai sebuah rekonsiliasi ialah membangun *mutual understanding* dan *trust* terlebih dahulu (Jeong, 2010: 193). Proses membangun kepercayaan bukanlah hal yang mudah, perlu adanya proses yang cukup panjang.

Salah satu CSO yang terlibat dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea antara lain ialah AFSC (*American Friends Service Committee*) yang merupakan organisasi masyarakat sipil yang berkerja untuk perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Menurut Lucy (2017), AFC merupakan salah satu masyarakat sipil yang turut membangun *trust* dan *understanding* di Korea Utara. AFSC pertama kali terlibat dalam misi di Korea Utara pada tahun 1950. Pada saat itu yang menjadi fokus utama ialah menyediakan banyak kebutuhan utama untuk mendukung masyarakat di Korea Utara yang hidup dalam masa sulit akibat perang. Keterlibatan AFSC dengan Korea Utara dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian gencatan senjata dimana secara umum memang menghentikan kekerasan namun secara resmi atau *official* mengakhiri Perang Korea (Lucy: 2017).

AFSC pada mulanya merespon himbuan dari PBB untuk memberikan bantuan kepada hampir lebih dari 33.000 pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal atau *displaced koreans*. Untuk itu, AFSC menginisiasi kampanye "*Houses for Korea*" atau rumah bagi Korea yang menyiapkan berbagai macam material untuk merekonstruksi tempat tinggal dan menyediakan peralatan pertanian untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sebagian besar ialah pertanian. Namun demikian, semakin memburuknya hubungan antara Amerika Serikat dengan Korea Utara, AFSC pada akhirnya dipulangkan (Lucy: 2017).

Pada tahun 1994, Korea Utara mengalami kemerosotan ekonomi yang mengakibatkan kelaparan, AFSC menjadi satu-satunya organisasi Internasional yang datang untuk menolong. Tindakan tersebut dilakukan dengan didasarkan kepada keyakinan, saling mengerti dan *respect* terhadap rasa kemanusiaan. Kegiatan utama dari organisasi tersebut ialah mengembangkan program agrikultur dan pertanian. Saat ini, AFSC telah bekerjasama dengan beberapa pihak di Korea Utara antara lain Akademi Ilmu Pertanian dan Fakultas Pertanian/ *Agriculture* Universitas Kim Il Sung untuk meningkatkan produktifitas dan mengimplementasikan praktek agrikultural yang berkelanjutan. Selain masalah terkait pertanian, AFSC juga mengurus masalah pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat Korea Utara baik yang sifatnya perorangan, institusi, dan juga pemerintah terkait berbagai macam topik (Lucy: 2017).

Hal tersebut menjadi contoh keberhasilan hubungan antara masyarakat sipil Korea Utara dan Amerika Serikat di tengah hubungan politik dan internasional yang sangat fluktuatif. Dalam menjalankan kegiatannya, AFSC bekerjasama dengan KNPC (*Korean National Peace Committee*) yakni organisasi masyarakat sipil Korea Utara yang bekerja menjalankan misi perdamaian di Semenanjung Korea dan Kawasan. Bagi KNPC, tujuan utama yang ingin dicapai ialah bagaimana mengajak pihak yang terlibat dalam Perang Korea untuk bertanggung jawab dan mencari solusi bersama-sama terkait perdamaian di Semenanjung Korea. AFSC sendiri merupakan salah satu bagian kecil masyarakat sipil yang peduli terhadap isu keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea. Untuk itu, agar akses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea terjalin dengan lebih luas maka organisasi masyarakat sipil yang ada turut bergabung dalam satu jaringan masyarakat sipil global yang terafiliasi yang dalam hal ini ialah GPPAC (*Global Partnership for Prevention of Armed Conflict*).

Masyarakat sipil merupakan bagian yang sangat dinamis dan mampu memberikan pandangan yang lebih luas. Untuk menjadi sebuah gerakan yang lebih besar dan diharapkan mampu untuk mengangkat kembali *track 1* untuk kembali hidup, maka CSO yang ada tergabung

dalam sebuah jaringan masyarakat sipil. Kehadiran GPPAC merupakan sebuah bentuk keterlibatan sipil global yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea guna mencegah terjadinya konflik dengan eskalasi yang tinggi hingga memicu kekerasan dengan cara-cara yang damai. Kehadiran GPPAC sebagai sebuah jaringan masyarakat sipil global merupakan sebuah representasi dari konsep *civic engagement* yang mana menjelaskan keterlibatan masyarakat sipil itu sendiri sebagai sebuah proses kolaboratif antara individu-individu dan atau kelompok-kelompok masyarakat sipil dalam sebuah jaringan yang lebih besar untuk mencapai sebuah tujuan bersama yakni perdamaian di Semenanjung Korea.

Keberadaan GPPAC sebagai jaringan CSO global merupakan sebuah langkah *preventive* agar konflik tersebut tidak terjadi dalam eskalasi yang lebih besar hingga menciptakan kekerasan. Dialog yang dilakukan oleh GPPAC sebagai *track II* merupakan representasi dari konsep *preventive diplomacy*, dimana untuk menjalankan upaya pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni fasilitasi, mediasi, rekonsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase (Muggah & White, 2013:5). Langkah dialog yang dilakukan oleh GPPAC merupakan sebuah bentuk fasilitasi bagi pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu forum bersama guna membahas mengenai isu-isu keamanan. Meskipun dalam forum tersebut sifatnya lebih luas, namun hal tersebut memberikan sebuah peluang bagi kedua belah pihak untuk saling berinteraksi satu sama lain sehingga dapat memunculkan rasa kepercayaan dan menghilangkan *stereotype* negatif yang selama ini melekat akibat perang di masa lalu. Dialog tersebut merupakan langkah awal dalam membangun *confidence*, dimana rasa saling percaya dan kejujuran merupakan permulaan yang paling penting dalam proses rekonsiliasi atau perdamaian. Dialog yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil setidaknya memberikan penawaran akan pengalaman yang berbeda mengenai pemecahan masalah.

GPPAC (*Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict*) menjadi pihak yang menginisiasi dialog konstruktif terkait konflik di Semenanjung Korea dengan menjadikan GPPAC-NEA (*North East Asia*) sebagai penanggung jawab proses dialog tersebut. Adapun dialog tersebut dilakukan secara netral dengan mengambil tempat di Ulaanbatar, Mongolia. Lokasi tersebut ditentukan dengan pertimbangan bahwa Mongolia merupakan negara yang memiliki posisi netral di Kawasan. Hal ini sesuai dengan teori resolusi konflik yang menjelaskan bahwa untuk menjalankan proses *gradual reform* atau membangun kembali hubungan yang sebelumnya retak dengan *building confidence and mutual understanding*, maka perlu adanya pihak ketiga netral yang memfasilitasi pihak berkonflik untuk bertemu. Dalam hal ini, Ulaanbatar merupakan tempat yang dirasa netral untuk menggelar sebuah dialog yang menghadirkan Korea Utara dan Selatan dalam satu meja.

Proses dialog di Ulaanbatar yang diselenggarakan oleh GPPAC diposisikan sebagai sebuah alternatif dialog dalam rana *track II* guna mendukung dialog dalam rana *track I* yang sudah tidak lagi efektif. Selain itu, Ulaanbaatar proses juga menciptakan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan berbagai macam bentuk perspektif pemikiran lintas batas wilayah termasuk melibatkan kedua negara berkonflik yakni Korea Utara dan Korea Selatan dalam satu forum yang sama. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan memiliki ruang untuk saling berinteraksi dan menyampaikan ide serta gagasan yang mungkin akan susah dan tidak bebas jika dilakukan dalam level *track I*.

Ulaanbaatar dialog pertama kali dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juni 2015 dan dihadiri oleh peserta dengan latar belakang aktivis serta akademisi dari Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Mongolia. Dalam kurun waktu dua hari, dialog tersebut membahas terkait isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Timur khususnya Semenanjung Korea. Diantaranya yang dibahas ialah mengenai pembentukan *Northeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone*, mengubah perjanjian gencatan senjata antara Korea Selatan dan Korea

Utara menjadi *permanent peace treaty* atau perjanjian damai yang sifatnya permanen. Untuk mencapai seluruh tujuan tersebut, dalam dialog tersebut juga dinyatakan bahwa perlu untuk meningkatkan peran masyarakat sipil yang berlatar belakang *gender oriented* seperti peran wanita dalam menyuarkan perdamaian di Semenanjung Korea atau yang lebih dikenal sebagai gerakan *Women Cross DMZ*.

Selanjutnya, pertemuan kedua dialog Ulaanbaatar dilakukan pada tanggal 14-16 November 2016. Diadakannya dialog tersebut bertujuan untuk memperluas kesempatan untuk membahas isu terkait masalah perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dengan menitik beratkan pada agenda untuk membentuk zona anti senjata nuklir di kawasan Asia Timur serta mendiskusikan mengenai efektifitas keterlibatan masyarakat sipil dalam meredam ketegangan, membangun kerjasama dan mencapai *peace building* dan stabilitas di Kawasan.

Tujuan utama yang ingin dicapai masyarakat sipil dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea tidak lain ialah *peace agreement* oleh kedua belah pihak dan membangun *Regional peace rezim* serta membangun *Nuclear Free in East Asia ( Mongolia Nuclear Free Zone)*. Bentuk inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh masyarakat sipil yang terlaksana dalam bentuk Dialog Ulaanbaatar tetap menjadi *opportunity* ditengah-tengah hubungan kedua negara yang cukup fluktuatif. Selain itu, keberadaan *Track I* justru tidak memberikan solusi dan sangat kecil pengaruhnya karena hubungan yang dibangun melalui *track I* sifatnya lebih *polirizing* atau terpolarisasi, sedangkan dalam proses resolusi konflik sendiri perlu untuk mendengarkan dan terlibat berbagai macam bentuk perspektif sebagai sebuah opsi atau pilihan.

Keterlibatan organisasi masyarakat sipil atau yang dalam hal ini ialah GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui dialog merupakan salah satu pendekatan diplomasi yang jika dikaitkan dengan teori resolusi konflik bertujuan untuk menciptakan *gradual reform*. Perubahan bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengubah tatanan sosial masyarakat yang sebelumnya penuh dengan rasa curiga

dan permusuhan menjadi pola hubungan yang lebih harmonis (James A. Schellengerg, 1996: 99). Dialog yang dilakukan melalui mekanisme *people to people* atau *community to community* melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat membangun rasa kebersamaan atau *we-ness* masyarakat baik Korea Utara dan Selatan. Kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh GPPAC dalam sebuah mekanisme dialog Ulaanbatar merupakan bentuk bagaimana jaringan kelompok masyarakat sipil berupaya untuk menciptakan *opportunity* atau peluang pihak yang berkonflik membangun kembali hubungan baik dan bisa saja proses tersebut dimungkinkan untuk mengarah pada mediasi dan dialog formal.

*Ulaanbatar dialogue* yang dilakukan secara rutin setiap tahun menjadi langkah awal untuk mencairkan hubungan pihak yang berkonflik. Meskipun dialog tersebut membahas mengenai masalah keamanan yang sifatnya luas, namun setidaknya proses tersebut adalah permulaan dalam membangun "*mutual understanding*" pihak yang berkonflik. Melalui forum tersebut, kedua belah pihak akan terus bertemu dan berulang-ulang sehingga kemungkinan mereka untuk berinteraksi pun lebih besar. Dengan demikian diharapkan lama-kelamaan akan muncul rasa *we-ness* atau yang dalam bahasa Korea lebih dikenal dengan istilah *cheong* diantara mereka. *Cheong* atau *we-ness* sendiri dapat terbentuk melalui beberapa hal berikut yang antara lain ialah memori kolektif, harapan, rasa percaya, empati dan Identitas bersama (Malik, 2017: 290-291).

Sering kali dalam masyarakat yang pernah berkonflik, ingatan pahit terkait kekerasan dan juga konflik tersebut akan terus membekas, sehingga lama-kelamaan akan muncul perasaan *victimhood* atau berlomba-lomba untuk menjadi Korban (Bar-Tal, 2009: Malik, 2017:290). Jika sudah demikian, maka setiap pihak akan membenarkan pendapatnya dan cenderung menyalahkan pihak lainnya. Untuk itu, tujuan dari proses dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil ialah untuk membangun dan mengembangkan *framework* bersama terkait permasalahan yang dihadapi. Sehingga hal tersebut sedikit banyak akan mengurangi memori

perang yang dimiliki, karena kedua pihak diberikan ruang untuk bertemu dan berbicara satu sama yang lainnya (Jeong, 2010: 198).

Menurut Kellet dan Dalton (2001), melalui dialog diharapkan dapat menciptakan dan membangun sebuah komunitas. Dimana biasanya, seseorang atau kelompok memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah komunitas maka otomatis kelompok atau individu tersebut berada atau memiliki tujuan yang sama dengan komunitas yang diikutinya. Hal ini sama dengan KNPC, dimana turut bergabung menjadi bagian dari jaringan GPPAC berarti KNPC juga memiliki tujuan yang sama dengan GPPAC yakni menciptakan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik bersenjata. Kehadiran CSO Korea Selatan dan Utara dalam dialog yang diselenggarakan di Ulaanbatar menjadi salah satu indikator bahwa kedua pihak memiliki tujuan yang sama yakni perdamaian. Meskipun “definisi” perdamaian yang diinginkan oleh kedua pihak bisa jadi berbeda, namun keikutsertaan kedua pihak menjadi jaringan GPPAC menjadi sebuah kesempatan untuk membangun harapan akan perdamaian di Semenanjung Korea oleh gerakan masyarakat sipil.

Berdasarkan kepada teori resolusi konflik, kegiatan fasilitasi oleh GPPAC yang berupa *Ulaanbatar dialogue* merupakan kerangka yang cukup penting dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea pada saat ini dimana *track I* sudah tidak lagi efektif. Melalui dialog, diharapkan akan terbangun rasa percaya, mengingat “*trust*” merupakan elemen terpenting dalam sebuah upaya resolusi konflik. “*Trust*” tidak lain bertujuan untuk mengurangi ketegangan, serta menciptakan rasa saling pengertian (*understanding*) dan mengidentifikasi kemungkinan dilakukannya kerjasama. Apabila sudah terbangun rasa percaya diantara pihak yang berkonflik, maka secara alami akan memunculkan identitas bersama antara Korea Utara dan Selatan. Identitas tersebutlah yang menjadi awal dari tumbuhnya *we-ness* atau *cheong* diantara mereka, yang bisa saja telah lama hilang akibat konflik yang berkepanjangan dan minimnya masyarakat dari kedua negara untuk saling bertemu.

Meskipun masyarakat kedua negara telah terpisah dan tidak saling berinteraksi antara satu dengan lainnya selama lebih dari 60 tahun, namun kepemilikan identitas bersama tidak dapat dipungkiri masih akan tetap melekat pada diri masyarakat Korea. Hal ini sesuai dengan survey yang dilakukan oleh IPUS pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 38.6 % dari 1.201 responden menyatakan bahwa penting untuk dilakukan unifikasi karena baik Korea Utara maupun Selatan berasal dari etnis yang sama. Sedangkan, 29.8% menyatakan jika unifikasi penting untuk menghilangkan ancaman perang antara Korea Utara dan Korea Selatan di masa yang akan datang. Sedangkan 31.6 % sisanya menjawab dengan berbagai macam alasan yang berbeda (IPUS, 2016: 36-37).

**Tabel 4. 2 Alasan Pentingnya dilakukan Unifikasi**

(Unit: %)

	Because we are the same ethnic group	Because separated families need to be reunited.	To eliminate the threat of war between North and South Korea	So North Korean people can live better lives	So South Korea can become a more advanced country	Other	Total [N]
2007	50.7	8.9	19.2	1.8	18.7	0.7	1,200
2008	58.7	6.6	14.5	2.9	17.2	0.1	1,213
2009	44.3	8.5	23.5	4.2	18.7	0.8	1,203
2010	43.3	7.0	24.2	4.0	20.8	0.6	1,200
2011	41.9	7.2	27.3	4.8	17.7	1.1	1,201
2012	46.0	9.1	25.3	4.4	14.5	0.8	1,200
2013	40.4	8.3	30.8	5.5	14.2	0.8	1,199
2014	42.1	9.1	27.0	3.9	17.6	0.3	1,200
2015	40.7	12.3	26.3	6.3	14.0	0.4	1,200
2016	38.6	11.8	29.8	5.0	14.2	0.7	1,201

Sumber: IPUS (2016: 37)

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa diantara seluruh alasan yang dikemukakan, persamaan etnis merupakan alasan yang paling banyak dipilih oleh responden meskipun data tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan tiap tahun. Namun, hal tersebut tetap mendukung bahwa proses perdamaian dapat dimulai melalui *grassroot* dengan lebih meningkatkan intensitas dialog dan pertemuan antar CSO baik Korea Utara maupun Korea Selatan. Dengan demikian,

dapat diharapkan rasa kebersamaan yang selama ini luntur akan kembali hidup diantara masyarakat kedua negara.

Menurut Jeong (2010: 198), dialog yang dilakukan oleh masyarakat sipil memungkinkan bagi anggota kelompok dari komunitas yang berseberangan untuk turut hadir guna membangun *mutual understanding* diantara mereka. Secara umum, proses dialog tersebut dilakukan secara informal dan tidak terlalu terstruktur, namun pembicaraan yang dilakukan dibangun untuk membangun dan mengembangkan *action plan* yang bisa diangkat di dalam forum-forum formal sesuai dengan agenda seting yang ada (Jeong, 2010: 192). Hal ini sesuai dengan proses dialog *ulaanbataar* yang dilaksanakan secara informal dan memungkinkan bagi pihak yang terlibat untuk lebih terbuka dalam menyuarakan pendapat terkait isu yang ada, salah satunya ketegangan di Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Selatan. Karena sifatnya yang informal dan *unstructure*, tidak jarang forum dialog seperti yang dilakukan oleh GPPAC di *ulaanbataar* terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang terorganisir dan membahas mengenai beragam isu yang terjadi di kawasan (Jeong, 2010: 201). Meskipun secara tidak spesifik membahas mengenai masalah yang dihadapi, namun setidaknya melalui forum tersebut kedua belah pihak dapat dipertemukan secara berkala, sehingga diharapkan muncul rasa saling mengerti dan percaya yang bisa saja selama kurun waktu lebih dari 60 tahun mulai memudar dan bahkan hilang sama sekali. Hal ini jika merujuk pada Malik (Wawancara, 5 Desember 2017) diistilahkan sebagai “Strategi bubur panas”.

Selain itu, interaksi yang di mulai dari *grassroot* dilihat sebagai langkah yang lebih efektif untuk memulai kembali normalisasi hubungan antara Selatan dan Utara. Hal ini dapat dilihat dengan meredahnya intensitas konflik antara kedua negara sebagai hasil dari rekonsiliasi dan dialog yang dilakukan dalam rangka persiapan Olimpiade Musim Dingin (*Winter Olympic*) yang dilaksanakan pada bulan february tahun 2018 di Pyeongchang, Korea Selatan. Pertemuan tingkat tinggi yang membahas mengenai Olimpiade antara kedua negara dimulai sejak tanggal 09

Januari 2018 di Panmunjom, Korea Selatan (Lewis, CNN News, 12 Januari 2018, diakses pada 16 Januari 2018).

Sebagai hasil dari pembicaraan tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan provokasi satu sama lain untuk mensukseskan pergelaran olimpiade tersebut. Korea Utara juga bersedia untuk mengirimkan delegasi atlet untuk berlaga dan 140 anggota orkestra di Korea Selatan untuk menampilkan pertunjukan seni selama berlangsungnya Olimpiade (Shin Hyohee, Kim Christine, Kantor Berita Reuters, 15 Januari 2018 diakses pada 16 Januari 2018). Pertemuan tersebut setidaknya mampu menunjukkan bahwa kedua negara secara bilateral atau *track 1* dapat memulai dialog dan menormalisasi hubungan melalui *grassroot* dimana pembahasan yang dilakukan berkaitan dengan olimpiade yang mana terdapat elemen sportifitas, profesionalitas, dan kompetisi di dalamnya. Selain itu, dengan setujunya Korea Utara untuk mengirimkan kelompok orksetranya merupakan salah satu bukti bagaimana pendekatan budaya dengan melibatkan masyarakat sipil mampu untuk memulai proses perdamaian di Semenanjung Korea antara kedua negara yang berkonflik. Hal tersebut merupakan permulaan yang baik dalam proses inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea melalui pendekatan budaya.

#### **4.3.2. Dinamika Keterlibatan GPPAC dalam Proses Perdamaian di Semenanjung Korea**

Kompleksitas konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, turut berimplikasi terhadap proses perdamaian yang diupayakan. Keterlibatan CSO atau GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea banyak dihadapkan oleh berbagai macam dinamika. Salah satu diantaranya ialah terkait bagaimana susahnya membangun "*trust*" yang merupakan modal awal dari proses rekonsiliasi. GPPAC membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendekatan kepada KNPC agar turut serta ikut dalam dialog. Dalam proses tersebut, GPPAC melakukan pendekatan dengan berbagai macam cara yang salah satunya ialah

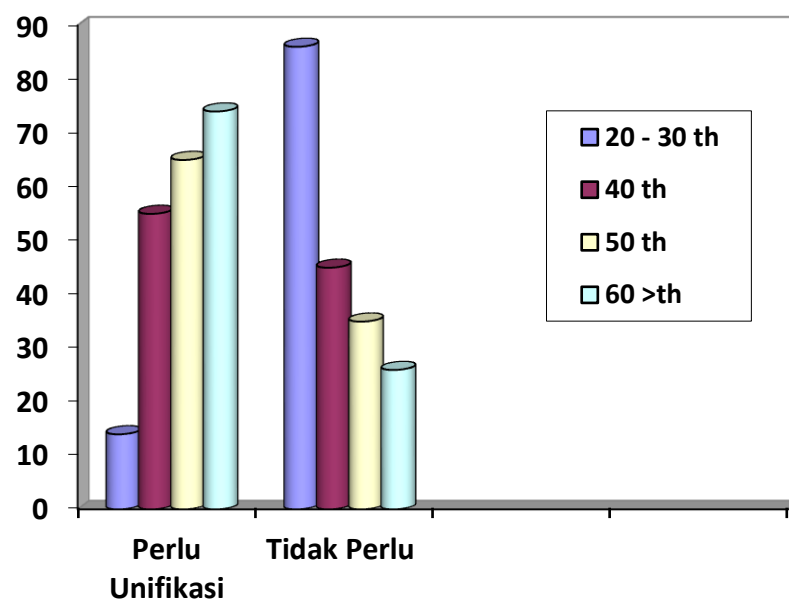
terlibat dalam kegiatan-kegiatan *emergency assistance* seperti memberikan bantuan logistik dan obat-obatan kepada Korea Utara. Selain itu, GPPAC melalui jaringan AFSC juga mencoba untuk menarik kepercayaan kelompok masyarakat sipil Korea Utara melalui bidang pertanian dan agrikultur yang bekerja sama dengan Universitas-Universitas di Korea Utara. Negosiasi dan pendekatan informal yang dilakukan tersebut pada akhirnya membuahkan hasil ketika Pemerintah Korea Utara memperbolehkan adanya *official delegation* yang diwakili oleh KNPC di tahun 2012.

Selain itu, dinamika lainnya yang dihadapi oleh GPPAC ialah semakin mengecilnya Kelompok masyarakat yang menginginkan reunifikasi di Korea Selatan. Hal ini tidak lain disebabkan oleh generasi muda di Korea Selatan yang saat ini kurang tertarik dengan isu-isu terkait reunifikasi. Perkembangan ekonomi serta kehidupan sosial masyarakat Korea Selatan menjadi salah satu alasan mengapa saat ini banyak diantara mereka yang tidak lagi menjadikan isu keamanan di Semenanjung Korea menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian disertasi dari Campbell (2011) yang menyatakan bahwa terjadi penurunan *interest* masyarakat Korea khususnya generasi muda terkait isu reunifikasi di Semenanjung Korea.

Secara umum, masyarakat sipil di Korea Selatan dibagi menjadi tiga kelompok yakni kelompok generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kelompok generasi pertama ialah generasi yang masih memiliki kedekatan hubungan dengan masyarakat Korea Utara. Generasi ini menganggap bahwa ide unifikasi ialah hal yang alami untuk dilakukan dan harus dicapai. Sedangkan generasi kedua ialah generasi yang lahir ditahun 1960-an dan aktif pada masa pemerintahan Roh Moo-hyun, sehingga generasi ini sedikit banyak mendapatkan pengalaman dan pendidikan demokrasi di Korea Selatan. Sehingga, secara ideologi mereka mendukung adanya reunifikasi. Berbeda dengan dua generasi sebelumnya, generasi ketiga justru memiliki identitas sendiri dan nasionalisme yang berbeda. Generasi ketiga terdiri dari usia antara 20

hingga 30 tahun atau yang dalam bahasa Korea disebut dengan istilah *isipdae* lebih menganggap bahwa Korea Selatan merupakan negara yang berdiri sendiri dan mereka tidak mau mengidentifikasi diri sebagai satu kesatuan dengan masyarakat Korea Utara (Wawancara Yeul, 3 Mei 2010, Campbell, 2011: 57-58). Hal ini didukung dengan survei yang dilakukan oleh *Institute for Peace and Unification Studies Seoul National University* (IPUS) tahun 2016 yang menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat Korea Selatan generasi pertama, kedua, dan ketiga dalam dukungannya terkait unifikasi di Semenanjung Korea. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui bagan sebagai berikut:

**Bagan 4. 2 Sikap Masyarakat Korea Selatan Terkait Unifikasi Berdasarkan Usia**



Sumber: IPUS (2016: 36)

Berdasarkan bagan tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, masyarakat Korea Selatan dengan usia antara 20 sampai 30 tahun terhitung hanya kurang lebih 14% yang mendukung dilakukannya unifikasi. Berbanding terbalik dengan masyarakat usia 60 tahun atau lebih yang 75% mendukung untuk dilakukannya unifikasi. Sedangkan, untuk angka usia 50 tahun dan 40 tahun relatif mendukung dengan angka 65 %

dan 55 %. Dengan demikian, hal ini dapat menunjukkan bahwa generasi muda di Korea Selatan tidak lagi menempatkan masalah terkait konflik Semenanjung Korea menjadi prioritas mereka. Banyak diantara generasi muda Korea yang menganggap bahwa apabila unifikasi dilakukan maka masyarakat Korea Utara justru menjadi beban serta masalah baru bagi Korea Selatan (Kim Philo, 2015: 25). Meskipun demikian, masih banyak pula masyarakat Korea Selatan yang mendukung proses perdamaian dengan Korea Utara, khususnya para akademisi dan para aktivis kemanusiaan lainnya.

Ketakutan yang dialami oleh masyarakat Korea Selatan bahwa apabila terjadi unifikasi, maka penduduk dari Korea Utara justru nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial yang baru bagi masyarakat Korea Selatan yang saat ini sudah makmur. Namun demikian, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan berpikir bahwa perdamaian bukan berarti kedua negara harus bersatu atau reunifikasi. Perdamaian yang dimaksudkan dan yang ingin dicapai oleh kelompok masyarakat sipil atau GPPAC ialah bagaimana kedua negara menormalisasi kembali hubungan dan merubah perjanjian gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati menjadi perjanjian perdamaian. Pergantian tersebut tentu akan merubah status formal hubungan yang sebelumnya “perang” menjadi “damai”. Sehingga, memungkinkan bagi kedua pihak untuk meminimalisir tindakan provokasi dan permusuhan. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi GPPAC khususnya jaringan atau *working group* Korea Selatan untuk melakukan pendidikan perdamaian masyarakat umum khususnya kepada generasi milenial Korea Selatan.

Proses yang tidak mudah untuk memperoleh dukungan dan membangun kepercayaan serta *mutual understanding* baik di Korea Selatan maupun Korea Utara. Hal ini dikarenakan, kawasan Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang masih sangat kental dipengaruhi oleh bayangan sejarah konflik dan perang dimasa lalu. Permusuhan yang saat ini terjadi antara Korea Selatan dan Utara merupakan produk dari masa kolonialisme Jepang dan diperburuk pada masa perang Dingin.

Ingatan-ingatan akan perang tersebut banyak mempengaruhi pola interaksi dan tata kenegaraan di Semenanjung Korea. Kedua negara tidak bisa lepas dari penguatan kekuatan militer dan penempatan pasukan hingga ke perbatasan.

Tidak mudah bagi jaringan masyarakat sipil untuk menghilangkan memori kolektif Korea Utara dan Selatan terkait sejarah perang di masa lalu. Merujuk pada teori konflik, selama kondisi negara atau kelompok individu masih merasa terancam atas kehadiran dari negara atau individu lainnya, maka hal tersebut mengindikasikan adanya konflik diantara mereka (Galtung, 2007:131). Selain itu, kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea membuat hubungan antara Utara dan Selatan menjadi lebih kompleks. Bagi KNPC, yang diperlukan untuk membangun perdamaian di Semenanjung Korea ialah baik Korea Utara ataupun Selatan membutuhkan ruang dimana salah satu caranya dengan mengurangi intervensi dari negara lain, khususnya Amerika Serikat untuk mundur dan memberikan sedikit ruang untuk Korea Utara dan Selatan. Menurut KNPC, ruang tersebut mampu tercipta jika saja Korea Selatan meninjau kembali hubungan kedekatannya dengan Amerika Serikat. Mengingat, tantangan terbesar bagi proses rekonsiliasi dan reunifikasi antara Selatan dan Utara ialah keberadaan pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (Lucy: 2017).

Memori Kolektif akan sejarah perang di masa lalu serta kehadiran negara besar lainnya yang mengintervensi menjadi sebuah dinamika yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam upaya inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Tantangan besar yang dihadapi ialah bahwa konflik di Semenanjung Korea terjadi secara terstruktur dan kompleks. Oleh karena itu, hal tersebut juga berimplikasi kepada proses pencarian jalan keluar yang pada akhirnya menjadi kompleks.

Hal ini merujuk pada teori konflik struktural bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea merupakan produk dari bagaimana sebuah konflik di masyarakat sengaja untuk dikelola dan dibentuk (James A. Schellenberg, 1996: 97). Ketegangan yang terjadi antara Korea Utara dan

Selatan pada saat ini merupakan hasil dari kondisi struktural yang terjadi di masa lampau. Ketegangan tersebut merupakan lanjutan dari Perang Korea yang terjadi di tahun 1950 sebagai akibat dari perang Dingin. Memori kolektif masyarakat akan perang pada masa lalu tidak akan pernah hilang karena baik oleh pemerintah Korea Selatan maupun Utara, memori tersebut selalu dihidupkan melalui tindakan-tindakan provokasi dan saling mengancam oleh Kedua Negara yang akhirnya menjadikan rasa benci akan terus tumbuh.

Selain itu, kondisi struktural tersebut sengaja dipertahankan oleh negara dengan membiarkan intervensi Amerika Serikat terus berlanjut di Semenanjung Korea melalui Korea Selatan. Hal inilah yang senantiasa membentuk ketegangan di Semenanjung Korea hingga saat ini. Bagi Korea Utara, Amerika Serikat merupakan aktor utama penyebab terjadinya perang dan perpecahan antara Korea Utara dan Selatan. Kehadiran Amerika Serikat di Semenanjung Korea bisa dibaratkan sebagai “Korek Api” yang sewaktu-waktu bisa menyulut ketegangan dan memunculkan konflik yang bukan tidak mungkin dapat menghasilkan kekerasan.

Berdasarkan kepada teori konflik sosial struktural, pertentangan yang terjadi di Semenanjung Korea pada saat ini terbentuk akibat dipengaruhi oleh empat faktor pendorong, antara lain ialah (Kearney, 2017: 27-50):

a. Pengembangan dan uji coba persenjataan oleh Korea Utara

Korea Utara merupakan salah satu negara yang sangat aktif dalam mengembangkan teknologi persenjataannya. Tercatat Korea Utara bebarapa kali melakukan uji coba rudal dan misil. Adapun pengembangan persenjataan tersebut merupakan sebuah reaksi atas ancaman dari aliansi Korea Selatan dan Amerika Serikat di kawasan. Sebagai negara yang secara diplomatik tidak banyak memiliki koneksi serta dukungan dan kondisi negaranya yang secara administratif masih berada dalam *war zone*, maka salah satu cara untuk *survive* ialah dengan menguatkan persenjataan yang dimiliki sebagai bentuk *self defense*. Hal tersebut ialah sesuatu yang alamiah dan wajar jika

sebuah negara melakukan peningkatan kekuatan militer, namun di sisi lain hal tersebut dianggap sebagai sebuah ancaman bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat. Apabila sudah demikian, maka situasi *arm race* atau perlombaan senjata pun tidak bisa dihindari. Hal tersebutlah yang hingga saat ini menjadikan konflik di Semenanjung Korea menjadi sangat kompleks.

b. Penarativan sepihak baik oleh Korea Utara maupun Selatan

Ketika konflik menjadi semakin *protracted*, maka pelabelan dan penarasian satu pihak kepada pihak lainnya menjadi semakin mudah atau *simple*. Selain dalam bentuk perlombaan senjata, tindakan provokasi oleh kedua belah pihak yang berkonflik juga seringkali dilakukan melalui narasi-narasi negatif. Tidak jarang media masa Korea Selatan dan Utara saling memberikan gambaran dan label yang buruk satu sama lainnya.

Media masa Amerika Serikat dan Korea Selatan seringkali menyebut Korea Utara sebagai negara yang “brutal”, “paranoid”, “*reclusive*”, dan dipimpin oleh seseorang yang diktator, keras, dan bertindak kejam terhadap masyarakatnya. Sehingga, hal tersebut seolah-olah menguatkan bahwa intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat merupakan sebuah keharusan dalam rangka mengamankan agar pengaruh komunisme tidak menyebar ke Korea Selatan dan melindungi Korea Selatan dari serangan Korea Utara (Jack Kim, Reuters, 9 September 2016). Begitupun sebaliknya dengan Korea Utara yang melabeli Korea Selatan sebagai anak anjing yang selalu menuruti majikannya yakni Amerika Serikat. Bagi Korea Utara, Amerika Serikat dipandang sebagai sebuah ancaman imperialisme dunia dan penerus kolonialisme Jepang di Semenanjung Korea (Worden, Bruce, 2008: 277).

Pelabelan tersebut oleh pemerintah terus disuarakan melalui media massa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap opini masyarakat bahwa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing negara merupakan hal yang benar. Oleh karena itu,

tindakan pelabelan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu tantangan dan dinamika yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea. Semakin pelabelan tersebut diutarakan, maka semakin bertahan pula konflik di Semenanjung Korea, mengingat persepsi merupakan hal yang paling susah untuk dirubah. Jika label dan persepsi negatif sudah tertanam, maka proses menumbuhkan "*trust*" antara pihak yang berkonflik akan semakin lebih sulit untuk dilakukan.

c. Sanksi militer dan ekonomi yang diberikan oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan terhadap Korea Utara

Bisa dikatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea menjadi lingkaran provokasi antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan kepada Korea Utara. Sebagai bentuk respon atas peningkatan kekuatan militer oleh Korea Utara, Amerika Serikat dan Korea Selatan dibandingkan menggunakan pendekatan yang lebih diplomatis dan dialog, justru lebih memilih untuk memberikan sanksi kepada Korea Utara. Bagi Korea Selatan dan Amerika Serikat, kegiatan proliferasi Nuklir oleh Korea Utara merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas keamanan global. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat semakin menekan Korea Utara dan diharapkan dengan seperti itu maka akan terjadi keruntuhan rezim. Namun, kenyataanya sanksi tersebut tidak mampu untuk melemahkan Korea Utara justru malah semakin meyakinkan Korea Utara untuk terus mengembangkan kekuatan Nuklirnya. Bagi Korea Utara, Nuklir merupakan salah satu alat untuk melindungi negara dari ancaman dan sudah menjadi simbol. Semakin besar sanksi yang diberikan, semakin besar pula Korea Utara meningkatkan kekuatannya. Dengan diberikannya sanksi oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat, konflik di Semenanjung Korea pun akan semakin meningkat.

- d. Kompetisi militer dan ekonomi antara Amerika Serikat dan China turut mempengaruhi konflik di Semenanjung Korea.

Apabila Amerika Serikat sejak sekian lama berusaha untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba, Iran, dan beberapa negara lainnya, namun mengapa hal tersebut sangat susah untuk dilakukan dengan Korea Utara. Ditambah dengan adanya permintaan dari Korea Utara kepada pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan normalisasi hubungan dan mengganti perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian damai beberapa waktu yang lalu tentu akan semakin mempermudah jika memang ingin melakukan normalisasi guna mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Namun, kenyataannya Amerika Serikat tetap menolak tawaran dari Korea Utara dan memilih untuk melanjutkan intervensinya di kawasan. Banyak pihak yang menyatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea tidak lain dipengaruhi oleh adanya kepentingan Amerika Serikat terkait rivalitasnya dengan Tiongkok.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat hingga pada tahun 2010 Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-dua di dunia turut mempengaruhi pola hubungannya dengan Amerika Serikat (Jennifer Harris, 2016). Peningkatan ekonomi Tiongkok, juga dibarengi dengan peningkatan kekuatan militernya. Hal ini menjadi ancaman bagi eksistensi Amerika Serikat sebagai negara besar yang berpengaruh di dunia. Dengan kata lain bahwa, Tiongkok kini menjelma sebagai kekuatan baru atau *the new rising state* yang mampu menyaingi Amerika Serikat.

Sebagai respon terhadap Tiongkok, pada tahun 2011 Amerika Serikat dibawah pemerintahan Obama membentuk kebijakan "*pivot to Asia*" yaitu kebijakan yang tujuan utamanya ialah "*rebalance*" atas Tiongkok dengan cara menguatkan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di kawasan Asia salah satu yang terdampak ialah kawasan Asia Timur (Congressional Research Service, 2012). Sebagai respon atas

peningkatan militer Tiongkok, Amerika turut menempatkan pasukan militer di beberapa negara di kawasan Asia Timur seperti di Jepang dan Korea Selatan. Selain itu, posisi Korea Selatan yang berkonflik dengan Korea Utara serta isu persenjataan Korea Utara menjadi tempat bagi Amerika Serikat untuk “menjual senjata” kepada Korea Utara. Hal ini dibuktikan dengan kesepatan Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk mengembangkan THHAD beberapa waktu yang lalu meskipun saat ini rencana tersebut telah dikaji ulang oleh presiden Korea Selatan yang baru, Moon Jae In.

Merujuk pada perspektif realis maka bisa dikatakan bahwa konflik di Semenanjung Korea bisa saja memang berusaha untuk dipertahankan oleh Amerika Serikat untuk mewujudkan kepentingannya di Kawasan Asia Timur, baik dalam hal rivalitas dengan Tiongkok atau juga sebagai pasar bagi perkembangan industri pertahanan di Amerika Serikat itu sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan pada teori konflik yang dijelaskan dengan pendekatan *social structural theory* dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Semenanjung Korea tidak lain terjadi karena dilatar belakangi oleh masalah struktural dari masa penjajahan Jepang dan dipertajam pada masa perang dingin yang memicu terjadinya perang sipil di Korea pada tahun 1950. Perang sipil (*korean war*) inilah yang kemudian menjadi awal dari ketegangan di Semenanjung Korea hingga sampai sekarang. Selain itu, kondisi *cold peace* tersebut sengaja dipertahankan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan di kawasan yang dalam hal ini ialah kepentingan Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur yang pada akhirnya turut berimplikasi kepada masalah keamanan di Semenanjung Korea.

Kompleksitas konflik dan hubungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat turut berimbas kepada kelompok masyarakat sipil atau CSO Korea Selatan yang justru tidak terlalu bebas untuk menyatakan pendapatnya dan perspektif mereka terkait perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini dikarenakan masih banyak dibayangi oleh kepentingan pemerintah Korea Selatan yang berkepentingan dengan Amerika Serikat. Dari sini bisa dilihat bahwa terjadi dilema yang cukup besar dari sisi Korea

Selatan baik dari sisi *track I* maupun *track II* terkait keberadaan Amerika Serikat di Korea Selatan. Khususnya pada saat ini, dimana tantangan terbesar yang dihadapi ialah terjadinya *global deteriorate* akibat perubahan pemerintahan dari Barack Obama ke pemerintahan Donald Trump yang berimbas pada tidak mudahnya masyarakat sipil untuk memiliki *constructive role* dalam menginisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea khususnya dari sisi Korea Selatan. Kompleksitas konflik dan hubungan aliansi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan dinamika dan tantangan yang harus dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Dinamika lain yang dihadapi oleh GPPAC dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea ialah berkaitan dengan pendanaan. Sebagai kelompok masyarakat sipil, kegiatan operasional organisasi berjalan dengan disokong oleh pendanaan dari pihak ketiga. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh GPPAC ialah meyakinkan kepada pihak ketiga sebagai donatur terkait kegiatan GPPAC dalam proses perdamaian di Semenanjung Korea. Hal ini tidak lain berkaitan dengan persepsi negatif masyarakat terhadap Korea Utara yang mana bagi "*normal people*" masalah utama di Korea Utara ialah "Isolasi" dan "negara banyak sanksi". Oleh karenanya, pihak donatur atau pihak ketiga akan berpikir ulang untuk memberikan dananya untuk proses perdamaian di Semenanjung Korea. Walaupun demikian, tidak seluruh pihak memandang skeptis Korea Utara. Masih banyak pihak yang mendukung dan mengharapkan agar perdamaian di Semenanjung Korea bisa segera terwujud.

Inisiasi perdamaian yang dilakukan oleh GPPAC melalui dialog dan juga pendekatan *P to P* akan terus dijalankan sebagai langkah alternatif ditengah kebuntuan *track I*. Hal ini merujuk berdasarkan pada kosep *civic engagement* yang dinyatakan bahwa (Wanis, Kew, 2008:13):

*"Civil society groups can help bring greater public representasion into negotiatioin. Civil society, however speaks with many voices and stand in the **shadow** of domination by political elites. Civil*

*society is not uniform, it comes in many organizational forms it can have varying degrees of autonomy from the state and sometimes it can even serve as a substitute for the state when government fails to serve their population's need".*

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa masyarakat sipil dapat membawa berbagai macam kelompok masyarakat untuk ikut dalam negosiasi dan berbicara mengenai satu permasalahan dalam berbagai macam perspektif. Masyarakat sipil, berdiri sebagai bayangan atas dominasi elit politik yang dalam hal ini ialah *track I*. Namun, khusus dalam inisiasi perdamaian di Semenanjung Korea masyarakat sipil yang dalam hal ini ialah GPPAC bukan lagi sekedar menjadi *shadow* atau bayangan tetapi melalui jaringan yang besar GPPAC berusaha untuk mendorong dan mengajak *track I* untuk kembali hidup dan bersama-sama mengupayakan proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Sejatinya upaya yang dilakukan oleh *track II* tidak akan pernah cukup untuk benar-benar mampu menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea tanpa adanya dukungan dari *track I*. Tujuan utama dari GPPAC melalui dialog-dialog yang dilakukan ialah turut mendorong agar pemerintah dalam hal ini *track I* kembali berfungsi dan memulai kembali dialog untuk rekonsiliasi dengan satu tujuan yang sama yakni perdamaian bukan hanya terkait *national security* saja. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan oleh *track II* haruslah berjalan beriringan dengan *track I* karena pada dasarnya kedua pendekatan tersebut merupakan sebuah kombinasi yang kuat untuk menciptakan perdamaian. Jika *track II* bergerak pada level yang sifatnya non-formal dan melakukan pendekatan melalui *grassroot* atau *bottom-up*, maka *track I* bergerak pada level formal yang mengupayakan perdamaian dari sisi kebijakan strategis berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan sehingga sifatnya akan lebih mengikat.